

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP No. 43 tahun 2014).

Sebagai kesatuan masyarakat hukum, nagari perlu untuk selalu memikirkan bagaimana kondisi desanya dimasa yang akan datang, sehingga nagari tersebut bertambah maju. Untuk mewujudkan harapan tersebut, berdasarkan sumberdaya, potensi dan masalah yang dimiliki, maka desa perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) atau langkah-langkah yang perlu dilakukan selama 6 (enam) tahun.

Pemerintah Nagari dalam menyelenggaraan urusan pembangunan nagari perlu berdasarakan pada perencanaan pembangunan nagari yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat nagari. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan nagari yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan nagari guna menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nagari menggunakan pendekatan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Nagari yaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan nagari. Mengikut sertakan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan rencana pembangunan bagi kemajuan desanya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Nagari. Setiap aspek rencana pembangunan harus disusun berdasarkan kajian masalah dan potensi yang ada di nagari. Hal yang terpenting adalah melakukan kajian masalah dan potensi secara menyeluruh agar menghasilkan perencanaan yang matang dan relevan sehingga arah, tujuan dan kebijakan pembangunan nagari tersaji dalam dokumen RPJMNag ini. Perencanaan pembangunan nagari diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan dan kesatuan nagari. Perencanaan Pembangunan Nagari dilaksanakan dengan sistem Perencanaan penyelenggaraan Negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan Daerah. Diharapkan menjadi Dokumen Perencanaan yang bermakna strategis sehingga dapat menjadi kerangka acuan pembangunan oleh instansi teknis yang terkecil baik ditingkat Pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi maupun Nasional yang selanjutnya akan terwujudnya Pembangunan yang lebih baik, efektif dan efisiensi.

Pada tataran operasional, pengintegrasian mensyaratkan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag), yang didukung dengan peningkatan manajemen pemerintahan nagari sebagai basis. Pada konteks itu, efektivitas fasilitasi untuk memastikan pemerintah nagari membentuk Peraturan Nagari, menetapkan ADD dan Pertanggungjawaban Wali Nagari secara rutin menjadi penting. Hal itu juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas proses dan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Nagari, kecamatan dan Kabupaten serta keselarasan rencana kegiatan dan anggaran dari berbagai sumber, khususnya APBN.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9024);
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021);
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang SOTK Nagari;

18. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017);
19. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan 420/591/SE/DPMDPPKB-PS/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018 – 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahunan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kerjasama Antar Desa dalam Bidang Pemerintahan;
21. Peraturan Pemerintah Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (PD);
22. Peraturan Pemerintah Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes;
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang RPJP-D 2005-2025 Kabupaten Pesisir Selatan;
24. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang RT/RW 2010-2030 Kabupaten Pesisir Selatan;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Adapun maksud disusunnya RPJMNag Limau Purut Tapan sebagai dasar dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 6 (enam) tahun kedepan. Dengan dokumen ini, dimaksudkan agar dapat menjadi landasan dan pedoman penyelenggara pemerintah Nagari dan masyarakat Nagari dalam pelaksanaan pembangunan Nagari Limau Purut Tapan berdasarkan masalah dan potensi serta arah kebijakan dalam pembangunan di Nagari.

1.3.2 Tujuan

- a. Untuk menentukan arah kebijakan pembangunan nagari, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari.
- b. Merumuskan rencana pembangunan nagari yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat.
- c. Merumuskan arah tujuan kebijakan dan strategi pembangunan nagari.
- d. Menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran.
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat di nagari dalam proses pembangunan.

1.4. Manfaat

Manfaat dari sebuah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari ini adalah sebagai pedoman dan acuan kerja Pemerintah untuk pencapaian Visi dan Misi Wali Nagari 6 (enam) Tahun kedepan. Sehingga nampak arah dan tujuan Pembangunan serta Kebijakam Pembangunan Pemerintah Nagari selama 6 (enam) Tahun Pemerintahan berjalan. sehingganya Masyarakat mengetahui seluruh program yang direncanakan oleh Wali Nagari, dan target yang dicapai sesuai dengan prioritas atau sesuai dengan janji politik sewaktu mencalonkan diri.

BAB II

PROFIL NAGARI

2.1 Sejarah Nagari

Awalnya Nagari Tapan berdiri dirintis oleh Payung Mahkudum Sakti dari Sumanik Pagaruyung beberapa tahun yang lalu. Setelah dirintis oleh Mahkudum Sakti datang lagi seorang mamak / nenek yang bergelar Samuno Darajo, juga dari Pagaruyung sesudah itu berdirilah Pondok / Pemonudukan. Beberapa tahun kemudian berdirilah Koto dan setelah itu berdiri lagi yang dinamakan Dusun.

Sesuai dengan pegang pakai adat Tapan sekarang bahwasanya nenek / payung dari Makkudum Sakti, Pendam / kuburannya menjadi sejarah untuk masyarakat Tapan sehingga 2 kali dalam satu tahun masyarakat selalu berkunjung kepemakaman beliau, inilah tradisi adat masyarakat Tapan. Dalam kunjungan tersebut disamping membersihkan areal pemakaman, sekaligus membuka sejarah atau pencetus Dusun Tapan dan menaikkan didalam suku yang ada dalam Nagari atau Dusun. Ada empat Suku di masyarakat Tapan yakni Suku Melayu Gedang, Suku Melayu Kecil, Suku Caniago dan Sikumbang. Diantara suku – suku yang dinaikan atau yang diutuskan oleh kaumnya untuk menjadi Penghulu, orang yang terpilih itu di Nobatkan Oleh warisan dari Mahkudum sakti itulah berdirinya Nagari Tapan. Dengan adanya pertemuan nenek terdahulu maka berdirilah penghulu suku penghulu suku di Tapan tahun 1824, pada waktu itu juga berdiri adat istiadat oleh nenek terdahulu. Pada tahun yang sama mufakat orang tersebut diatas bahwasanya orang tua adat Mahkudum Sakti ditunjuk menjadi orang tua adat Nagari Tapan.

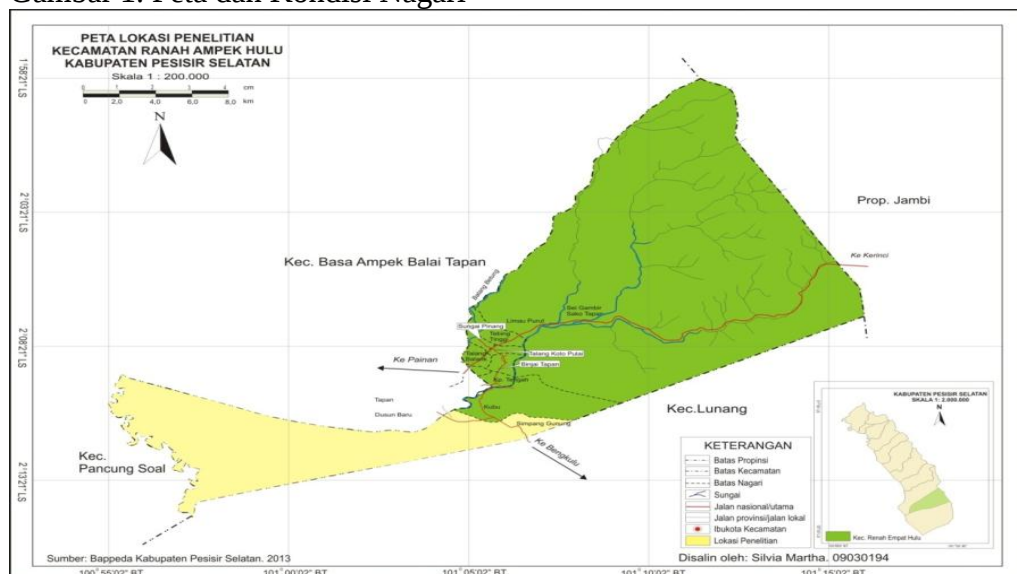
Sesuai dengan kenyataan pegang pakai adat yang ada dinagari, barang siapa yang menjadi penghulu maka orang itu dinobatkan atau dilantik oleh orang tua adat Nagari Tapan, Dan diberi gelar Mahkudum Sakti. Setelah berdiri adat, suku maka mufakatliah orang tersebut untuk pemimpin Nagari yang berdiri tahun 1824, empat suku itulah yang dipimpin oleh 1 Wali Nagari di Tapan.

Adapun cara pemilihan Wali Nagari pada waktu itu sistimnya ditunjuk oleh perwakilan 4 suku tersebut. Beberapa tahun kemudian sebelum Kemerdekaan tahun 1945 masih dipimpin oleh 1 Wali Nagari. Setelah Kemerdekaan 1945 Wali Nagari dipilih secara demokrasi / masyawarah. Pada tahun 1983 dengan adanya perkembangan penduduk maka dirobah oleh pemerintah pusat , Wali Nagari dirobah menjadi 17 Kepala Desa / Wali Desa. Pada tahun 1990, dirobah lagi menjadi 13 Kepala Desa, selanjutnya kembali lagi 1 Wali Nagari Tapan. Kemudian, Tahun berikutnya ada perobahan lagi dari 1 Wali Nagari tersebut, 13 Desa menjadi 17 Kampung, dari 17 Kampung ini dipimpin oleh 1 Wali Nagari Tapan kembali. Pada tahun 2009 tepatnya bulan Oktober, maka terjadilah pemekaran menjadi 8 Nagari.

Pada waktu itu sebagai Wali Nagari dipegang oleh Staf Kecamatan sebagai PJS. Tepatnya Tanggal 112 Desember 2010 maka dilantiklah 8 Wali Nagari yang defenitif oleh oleh Bupati Pesisir Selatan. Kemudian Pada Tahun 2012 Terjadi Pemekaran nagari Menjadi 20 Nagari dan untuk Nagari Sungao gambir sako Tapan menjadi 3 nagari salah satunya adalah Nagari Limau Purut Tapan, berada di daerah pinggiran sungai air Batang Tapan dan Batang Penadah.

2.2 Peta dan Kondisi Nagari

Gambar 1. Peta dan Kondisi Nagari



Nagari Limau Purut Tapan, kecamatan Ranaah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat merupakan 1 dari 10 Nagari di kecamatan Ranaah Ampek Hulu Tapan yang mempunyai jarak 160 Km dari kota kabupaten. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan sendiri merupakan salah satu dari 12 kecamatan di kabupaten Pesisir Selatan yang termasuk kategori kecamatan miskin. Secara geografis Nagari Limau Purut Tapan sendiri terletak di perbatasan sebelah barat dengan Nagari Talang Balarik Tapan, sebelah timur berbatasan dengan Nagari Sungai Gambir Sako Tapan utara Hutan TNKS, dan selatan berbatasan dengan Nagari Talang Balarik Tapan. Nagari Limau Purut Tapan letak topografis tanahnya pergunungan dan perberbukitan, dengan lahan sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian, sehingga sebagian besar masyarakat Nagari adalah petani.

Berkaitan dengan fasilitasi pembuatan dokumen RPJM Nagari Limau Purut Tapan merupakan kebutuhan yang mendesak terutama proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara partisipatif, demokratis dan setara. Sehingga dokumen RPJM tersebut mendapat dukungan dan legalitas dari semua unsur masyarakat.

2.1.1 Demografi

Nagari Limau Purut Tapan merupakan salah satu dari nagari Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas wilayah $\pm$ 60 Ha. Jumlah penduduk Nagari Limau Purut Tapan yaitu 1130 Jiwa yang terdiri dari laki-laki 578 orang dan perempuan 552 orang.

Tabel.1 Penduduk Nagari Limau Purut Tapan Menurut Umur

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk
0 - 5 Tahun	178 Orang
6 - 12 Tahun	221 Orang
13 - 16 Tahun	114 Orang

17 – 25 Tahun	198 Orang
26 - 54 Tahun	269 Orang
55 Tahun Keatas	160 Orang
Jumlah	1130 Orang

Sumber Data Profil Nagari Tahun 2017

Merujuk kepada Profil Nagari Limau Purut Tapan, 1.9 % orang merupakan tamatan Perguruan Tinggi. 0.5 % merupakan Tamatan Akademi. 9.6 % merupakan tamatan SLTA Sederajat. 21.6 % merupakan tamatan SLTP/Sederajat. 27.6 % merupakan tamatan SD/Sederajat. 25.9 % belum tamat SD/Tidak Tamat SD. Sisanya 12.9 % Tidak Sekolah.

Tabel.2 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tamat PT	19 Orang
Tamat Akademi	6 Orang
Tamat SLTA	108 Orang
Tamat SLTP	245 Orang
Tamat SD	313 Orang
Belum Tamat SD/Tidak Tamat SD	293 Orang
Tidak Sekolah	146 Orang
Jumlah	1130 Orang

Sumber Data Profil Nagari Tahun 2017

Tabel.3 Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Buruh tani	413 Orang
Buruh bangunan	74 Orang
Petani	221 Orang
Peternak	38 Orang

Pedagang	49 Orang
Tukang kayu	-
Tukang batu	6 Orang
Penjahit	2 Orang
Pengrajin	3 Orang
Perangkat desa/nagari	14 Orang
Industri kecil	3 Orang
Pengangkutan	-
Pegawai negeri sipil	5 Orang
TNI/POLRI/	-
Pensiunan	1 Orang
Lain-lain	207 Orang
Jumlah	1130 Orang

Sumber Data Profil Nagari Tahun 2017

a. Keadaan fisik/Geografis Nagari

Batas Wilayah Nagari Limau Purut Tapan

- ✓ Sebelah Utara : Hutan TNKS
- ✓ Sebelah Selatan : Nagari Talang Balarik Tapan
- ✓ Sebelah Barat : Nagari Talang Balarik Tapan
- ✓ Sebelah Timur : Nagari Sungai Gambir Sako Tapan

b. Luas wilayah Nagari Limau Purut Tapan

Nagari Limau Purut Tapan salah dari delapan Nagari di wilayah Kecamatan Ranaah Ampek Hulu Tapan yang terletak Delapan (8) km ke arah Timur dari Kota Kecamatan. Nagari Limau Purut Tapan Mempunyai luas Wilayah sebagai berikut :

- ✓ Pemukiman : 125 Ha
- ✓ Pertanian Sawah : 115 Ha
- ✓ Ladang : 201 Ha
- ✓ Hutan : 80 Ha

- ✓ Perkantoran : 0,25 Ha
- ✓ Sekolah : 1 Ha
- ✓ Jalan : 37 Ha

c. Keadaan Topografi Nagari

Secara umum keadaan topografi Nagari Limau Purut Tapan adalah merupakan dataran rendah dan perbukitan.

d. Iklim

Iklim Nagari Limau Purut Tapan sebagaimana daerah yang lainnya yang dilalui garis khatulistiwa yang beriklim Tropis, musim hujan dan musim kemarau hampir seimbang, hal ini berpengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di nagari Limau Purut Tapan.

e. Pertanian

1. Tanaman Pangan

✓ Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan

Jumlah Keluarga Memiliki Tanah Pertanian	:	160 Keluarga
Tidak memiliki	:	50 Keluarga
Memiliki kurang 1 ha	:	50 Keluarga
Memiliki 1,0 – 5,0 ha	:	29 Keluarga
Memiliki 5,0 – 10 ha	:	10 Keluarga
Memiliki lebih dari 10 ha	:	-
Jumlah Total Keluarga Petani	:	299 Keluarga

✓ Luas Tanaman Pangan Menurut Komoditas Pada Tahun Ini

Jagung	:	-	-
Kacang kedelai	:	-	-
Kacang tanah	:	-	-
Kacang panjang	:	-	-
Kacang mede	:	-	-
Kacang merah	:	-	-
Padi sawah	:	120 Ha	3,360 Ton/ha
Padi ladang	:	-	-

2. Perkebunan

✓ Pemilikan Lahan Perkebunan

Jumlah Keluarga Memiliki Tanah Perkebunan	:	200 Keluarga
Tidak Memiliki	:	99 Keluarga
Memiliki kurang dari 5 ha	:	150 Keluarga
Memiliki 10 – 50 ha	:	-
Memiliki 50 – 100 ha	:	-
Memiliki 100 – 500 ha	:	-
Memiliki 500 – 1000 ha	:	-
Memiliki lebih dari 1000 ha	:	-
Jumlah total keluarga perkebunan	:	299 Keluarga
Kepemilikan Usaha Perkebunan Yang Dimiliki Negara	:	-
Total Luas Perkebunan	:	450 Ha

✓ Luas Dan Hasil Perkebunan Menurut Jenis Komoditas

Jenis	Swasta/Negara		Rakyat	
	Luas (Ha)	Hasil (kw/Ha)	Luas (Ha)	Hasil (kw/Ha)
Kelapa				
Kelapa sawit			10 Ha	900 kw/Ha
Kopi			3 Ha	100 kw/Ha
Cengkeh				
Coklat				
Pinang				
Lada				
Karet			100 Ha	300 kw/Ha
Jambu Mete				
Tembakau				
Pala				
Vanili				
Jarak pagar				
Jarak kepyar				
Tebu				
Kapuk				
Kemiri				
Teh				

3. Kehutanan

✓ Luas Lahan Menurut Pemilikan

Milik Negara	:	
Milik Adat/Ulayat	:	
Perhutani/Instansi Sektoral	:	
Milik Masyarakat Perorangan	:	450 Ha
Total	:	450 Ha

4. Peternakan

✓ Jenis populasi ternak

Jenis Ternak	Jumlah Pemilik	Perkiraan Jumlah Populasi
Sapi	35 Orang	179 Ekor
Kerbau	20 Orang	165 Ekor
Babi		
Ayam kampung	289 Orang	858 Ekor
Jenis ayam broiler		
Bebek	2 Orang	15 Ekor
Kuda		
Kambing	10 Orang	55 Ekor
Domba		
Angsa		
Burung puyuh		
Kelinci		
Burung walet		
Anjing	20 Orang	25 Ekor
Kucing	35 Orang	35 Ekor

5. Sumber Daya Air

✓ Potensi Air dan Sumber Daya Air

Sungai	Debit : sedang
Danau	-
Mata Air	Debit: kecil
Bendungan/waduk/situ	-
Embung-embung	-
Jebakan air	-

✓ Sumber Air Bersih

Jenis	Jumlah (Unit)	Pemanfaat (KK)	Kondisi Baik/Rusak
Mata air	2		B
Sumur gali	275	275	B
Sumur pompa	-	-	-
Hidran umum	-	-	-
PAM	-	-	-
Pipa	-	-	-
Sungai	2	150	B
Embung	-	-	-
Bak penampung air hujan	-	-	-
Beli dari tangki swasta	-	-	-

f. Wilayah Administrasi Pemerintahan Nagari

Wilayah Administrasi Pemerintahan Nagari meliputi 2 (Dua) Kampung dikenagarian Limau Purut Tapan yaitu Kampung Penadah Hilir dan Kampung Penadah Mudik.

2.1.2 Keadaan Sosial

Kondisi sosial mencakup adat istiadat, budaya dan agama serta kesehatan, pendidikan dan seni olah raga. Adat istiadat dan budaya masyarakat Desa Pauh Kurai Taji bersifat musyawarah dan mufakat serta kegotong royongan. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini; Aspek sosial budaya mencakup Pendidikan, Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Agama, Pemuda dan Olahraga.

a. Aspek Pendidikan

Aspek pendidikan mencakup jumlah prasarana pendidikan, rasio guru dan murid, angka partisipasi sekolah, penurunan jumlah penduduk yang buta huruf dan angka kelulusan pada semua level sekolah. Sebagai terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel.4 Penduduk Menurut Indikator Pendidikan

Indikator Pendidikan	Jumlah
Angka Partisipasi kasar/ murni SD/MI	-
Angka Partisipasi Kasar/ Murni SLTP/ MTs	-
Angka Partisipasi kasar/ murni SLTA	-
Rasio guru/ murid TK/PAUD	-
Rasio guru/ murid SD	-
Rasio guru/ murid SLTP	-
Rasio guru/ murid SLTA	-
Jumlah TK/PAUD	1
Jumlah SD	1
Jumlah SLTP	-
Jumlah SLTA	-
Angka melek buta huruf	-
Jumlah	2

Sumber Data Profil Desa Tahun 2018

b. Aspek Kesejahteraan Sosial

Pada aspek Kesejahteraan Sosial, mencakup banyaknya penyandang masalah sosial menurut jenisnya sebagai berikut :

Tabel.5 Penduduk Menurut Kesejahteraan Sosial

Penyandang Masalah	Jumlah
Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar	1 Orang
Tuna susila	-
Tuna Netra	-
Bisu/ Tuli	5 Orang
Yatim Piatu dan Anak Terlantar	84 Orang
Orang jompo	9 Orang
Keluarga pra sejahtera	106 Keluarga
Keluarga sejahtera I	-
Keluarga sejahtera II	-

Keluarga sejahtera III	-
Keluarga sejahtera III +	-
Jumlah	204 Keluarga

Sumber Data Profil Nagari Tahun 2017

c. Aspek Kesehatan

Pada Aspek Kesehatan mencakup beberapa indikator pembangunan bidang kesehatan sebagai berikut :

1. Angka kematian bayi 0 orang dari jumlah bayi hidup 25 orang pada tahun 2017.
2. Angka harapan hidup 75 tahun 2017.
3. Angka kematian ibu melahirkan 0 orang dari jumlah ibu yang melahirkan 45 orang.
4. Kondisi anak dengan kategori gizi buruk 0 %
5. Jumlah posyandu 2 (yandu Balita)
6. Jumlah Bidan Desa 1 orang
7. Jumlah jamban 98 dari kepala keluarga berjumlah 229 KK

d. Aspek Agama

Pada aspek agama mencakup struktur penduduk berdasarkan pemeluk agama, seratus Persen penduduk adalah pemeluk agama Islam. Data selanjutnya dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel.6 Penduduk Menurut Agama

Agama	Jumlah
Islam	1130
Kristen	-
Katholik	-
Hindu	-
Budha	-
Jumlah	1130

Sumber Data Profil Nagari Tahun 2017

Prasarana Keagamaan meliputi Masjid dan Mushala/Surau, di Kampung Penadah Hilir ada 1 buah Masjid dan 1 buah Mushallah/surau, di Kampung Penadah Mudik ada 1 buah Masjid dan 1 buah Mushallah/surau.

e. Aspek Pemuda dan Olah Raga

Pada aspek pemuda dan olahraga mengandung pengertian bahwa struktur penduduk di Nagari Limau Purut Tapan dominasi oleh pemuda. Oleh karena itu, pembinaan dan penyediaan fasilitas untuk perkembangan kreatifitas dan olahraga menjadi agenda utama dalam pengembangan pemuda. Fasilitas/ Prasarana yang disediakan untuk kegiatan kepemudaan dan olah raga serta kesenian meliputi :

- ✓ Lapangan Tenis Meja : -
- ✓ Lapangan Bulu Tangkis : -
- ✓ Lapangan Sepak Bola : 1 tempat

f. Aspek Kebudayaan

Kegiatan kebudayaan yang pernah dilakukan di Nagari ini meliputi pengembangan dan pelestarian. Kegiatan yang dilakukan antara lain : Seni Budaya, Randai, Bicara Adat/Basitinah Kato, dan lain-lain.

2.2.3 Keadaan Ekonomi

Kegiatan perekonomian Nagari dapat diketahui dari beberapa indikator antara lain jumlah prasarana ekonomi, yaitu:

Tabel 7. Prasarana Ekonomi

Prasarana Ekonomi	Jumlah
Toko/ Kios	16
Warung	6
Lumbung Nagari	-
Mobil pick kup	9
Truk/ col	-
Jumlah	31

Sumber Data Profil nagari Tahun 2017

Sementara untuk perkembangan Usaha Ekonomi Nagari sebagai berikut :

- a. Peningkatan kemampuan pengrajin kecil
- b. Penyaluran modal usaha
- c. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perekonomian Nagari

2.2.4 Mata Pencaharian

Nagari Limau Purut Tapan merupakan Nagari Pertanian, maka sebahagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 8. Mata Pencaharian

PETANI	PEDAGANG	P N S	BURUH
310	24	5	69

2.3 Kelembagaan Nagari

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUSNag) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan memberi pelayanan kepada masyarakat desa yang mengacu pada pembangunan masyarakat.

Pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra dalam pemberdayaan masyarakat dan melibatkan tokoh agama, tokoh adat serta tokoh masyarakat lainnya.

2.3.1 Pembagian Wilayah Nagari

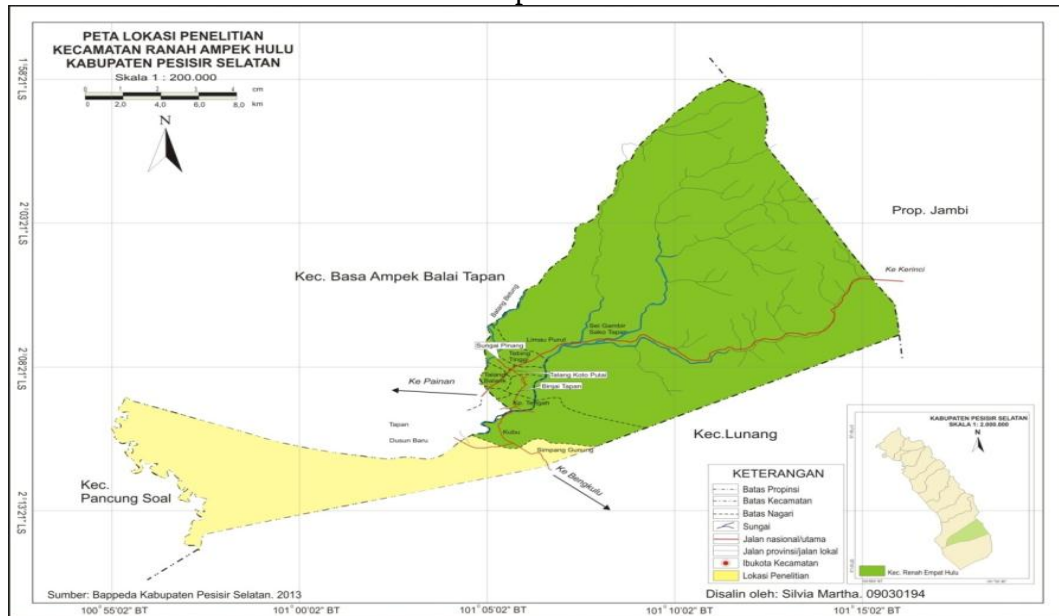
a. Batas Nagari

Nagari Limau Purut Tapan berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Berbatas Dengan Nagari Talang Belarik Tapan
Sebelah Selatan : Berbatas Dengan Nagari Talang Belarik Tapan

Sebelah Timur : Berbatas Dengan Nagari Sungai Gambir Sako Tapan

Sebelah Barat : Berbatas Dengan Nagari Talang Balarik Tapan



Gambar.2 Batas Nagari

b. Jumlah Kampung

Adapun Jumlah Kampung yang ada di Nagari Limau Purut

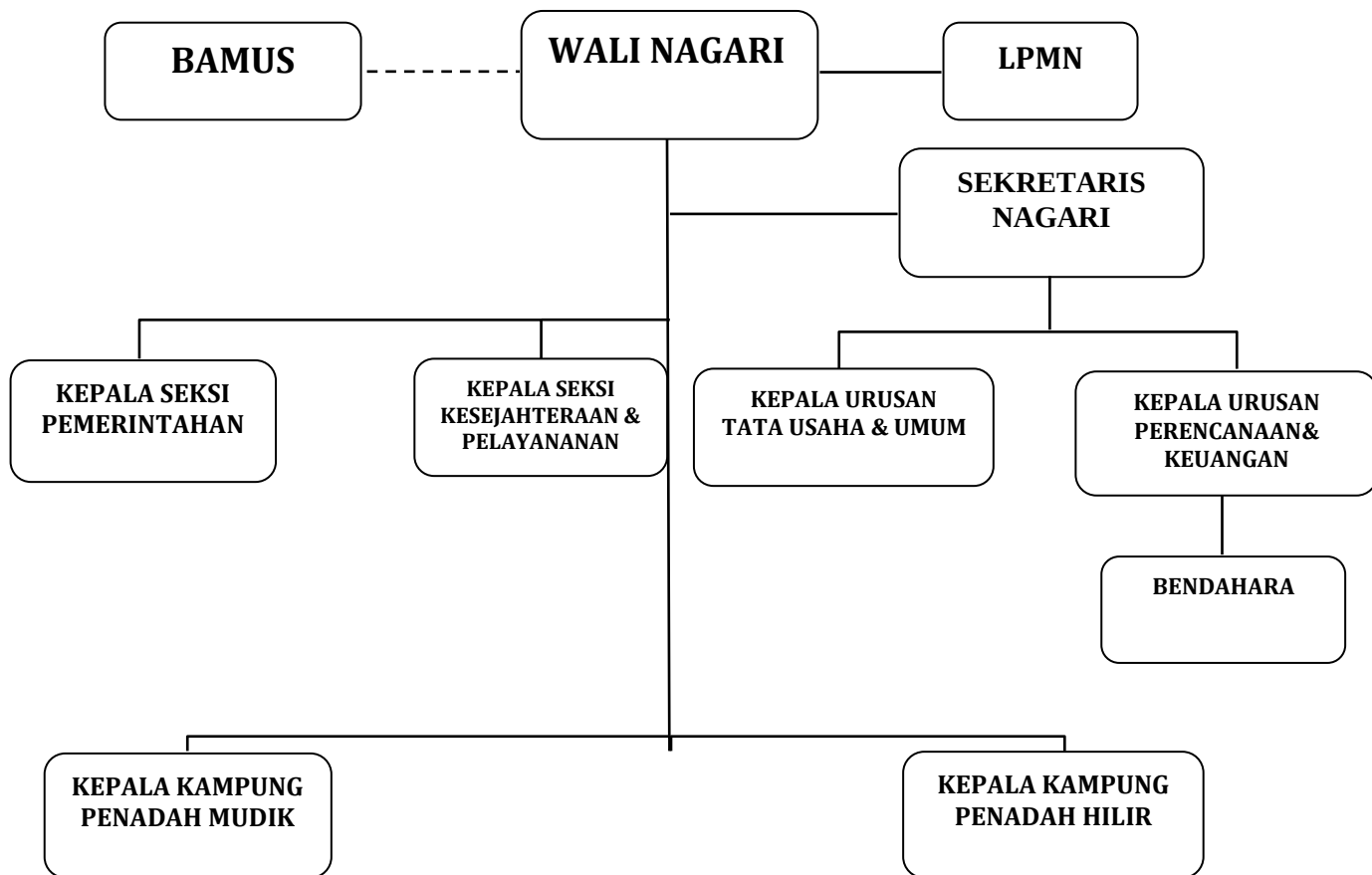
Tapan adalah :

1. Kampung Penadah Hilir
2. Kampung Penadah Mudik

2.3.2 Struktur Organisasi Pemerintah Nagari

- a. Pemerintahan Nagari terdiri dari Pemerintah Nagari dan BAMUS
- b. Pemerintah Nagari terdiri dari Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang mencakup Sekretaris Nagari dan Perangkat Nagari lainnya yang terdiri dari 2 (dua) orang Kasi, 2 (dua) Kepala Urusan, 1 (satu) orang Bendahara, dan 2 (dua) orang Kepala Kampung. Wali Nagari memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan kegiatan yang ditetapkan bersama BAMUS.
- c. Wali Nagari memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Bupati, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BAMUS serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada masyarakat.
- d. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris Nagari, Kasi, Kepala Urusan, Staf, dan Kepala Kampung bertanggung jawab kepada Wali Nagari.
- e. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya staf urusan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan dan Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Nagari.
- f. Dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, Wali Nagari dapat dibantu Lembaga Kemasyarakatan Nagari yang ada.

Gambar 3. Struktur Pemerintahan Nagari Limau Purut Tapan Tahun 2018



URAN BUPATI PESISIR SELATAN
R : 64 TAHUN 2016
ANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
KERJA PEMERINTAHAN NAGARI

2.3.3 Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS), dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Tabel.9 Struktur Organisasi BAMUS Nagari Limau Purut Tapan

NO	N A M A	J A B A T A N
1	AMRAN	Ketua
2	MARDI CANDRA	Wakil Ketua
3	JAKA PRATAMA	Sekretaris
4	WILMALINDA	Anggota
5	LIMARYANTO	Anggota

2.3.4. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), dengan Struktur Organisasi sebagai berikut:

- I. Ketua : Yona Kartika Rusmita, S.Pd
- II. Wakil Ketua I : Sesmayenti
- III. Wakil Ketua II : Yeni Afrianti
- IV. Sekretaris : Yuli Harliza
- V. Bendahara : Nursamsi
- VI. Kelompok Kerja I (Pokja I)
 - Ketua : Saryusni, S.Pd
 - Sekretaris : Gustiwarni
 - Anggota : 1. Rika Yuliza
2. Wilmalinda
3. Maini Wati
- VII. Kelompok Kerja II (Pokja II)
 - Ketua : Erna Wati
 - Sekretaris : Rina Puspita Sari, S.Pd
 - Anggota : 1. Mega
2. Susilawati
3. Armi Yanti
- VIII. Kelompok Kerja III (Pokja III)
 - Ketua : Eminarti
 - Sekretaris : 1. Meri
2. Asni
 - Anggota : 1. Helona Alegre
2. Desi Fianti
3. Irna Wati

IX. Kelompok Kerja IV (Pokja IV)

Ketua	:	Yanti Viska Yanti, Amd.Keb
Sekretaris	:	1.Riri Novita 2.Rusdati
Anggota	:	1.Dona 2.Fitri Yanti 3.Siti Sahara

Secara umum pelayanan Pemerintahan Nagari Limau Purut Tapan kepada masyarakat cukup memuaskan dan Kelembagaan yang ada berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

2.4 Dinamika Konflik

Dinamika konflik di nagari Limau Purut Tapan bisa disebutkan tidak pernah terjadi, hal ini disebabkan di Nagari Limau Purut Tapan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan tradisi Minang Kabau, yakni selalu menyelesaikan segala bentuk persoalan secara kekeluargaan melalui musyawarah mufakat. Kerukunan warga masyarakat Nagari Limau Purut Tapan sangat terjaga dan rasa kekeluargaan dan semangat saling berkerja sama sangat tinggi, hingga belum pernah terjadi konflik di Nagari Limau Purut Tapan hingga saat ini.

2.4 Masalah dan Potensi Nagari Limau Purut Tapan

Tabel 10. Masalah dan Potensi Nagari Limau Purut Tapan

No	Kampung	Masalah	Potensi
1.	Penadah Hilir	1. Tidak lancarnya transportasi di jalan Menuju Persawahan Lubuk Kubu dan Lubuk Resam.	Perkebunan, persawahan dan tenaga lokal ada
		2. Kurangnya kemampuan masyarakat untuk membeli bibit sapi ternak	Peternak dan lahan ada
		3. Tidak mampu masyarakat untuk membeli bibit ikan dan Pakan Ikan	Petani dan lahan ada
		4. Sangat sulit bagi petani membawa hasil pertanian untuk membawa ke rumah	Lahan dan tenaga lokal ada

		karna tidak ada jalan usaha tani.	
		5. Kurangnya skill masyarakat tentang ekonomi Rumahan	Masyarakat ada
		6. Kurangnya ketrampilan masyarakat tentang industri rumah tangga.	Masyarakat ada
		7. Masyarakat sulit mengembangkan usaha karena tidak ada modal	Masyarakat dan lahan ada
		8. Anak-anak usia dini belum mendapatkan pendidikan.	Anak-anak dan sekolah
		9. Kurangnya pendididkan agama dikalangan anak-anak dan masyarakat.	Anak-anak dan lahan ada
		10. Kurangyan lahan pemukiman masyarakat.	Badan jalan dan tenaga lokal
		11. Pelajar-pelajar dan masyarakat belum mengenal laptop apalagi penggunaannya.	Anak-anak usia sekolah ada
		12. Musim hujan banyak tanah Pesawahan dan Pemukiman penduduk longsor karena banjir	Tenaga kerja, batu kali, pasir, kerikil tersedia
		13. Tidak tersedianya alat transportasi Pemerintah Nagari	Tenaga ada
		14. Tidak tertampungnya jemaah disaat kegiatan pada hari besar Islam	Masjid ada dan lokasi ada
		15. Batas Kampung dan Nagari tidak jelas	Tenaga kerja , batu kali, pasir, kerikil ada
		16. Banyaknya genangan dimusim hujan yang tidak mengalir	Batu kali, pasir, kerikil, tenga kerja
		17. Banyaknya jumlah ternak yang berkeliaran	Kotoran ternak
		1. Minimnya tunjangan kader pos yandu / PMT / BKB	Kader ada
		2. Banyaknya masyarakat yang tidak memiliki jamban sehat	Pasir, Batu kali, tenaga kerja ada

		3. Minimnya tunjangan kesejahteraan Guru MDA / TPA	Lokasi ada
		4. Tingginya minat masyarakat untuk mengembangkan usaha kecil	Lokasi ada
		5. Kurangnya minat masyarakat mendalami agama	Tempat tersedia
		6. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyelenggaraan Jenazah	Tempat tersedia
		7. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang pembuatan makanan	Tempat tersedia
		8. Banyaknya masyarakat yang tidak memiliki Ijazah	Tenaga Pengajar ada
		9. Banyaknya murid yang tamat SMP kesulitan transportasi karena jangkauan SMA yang ada cukup jauh	Lokasi ada, murid ada
		10. Tingginya minat masyarakat untuk mengembangkan usaha kecil	Pedagang ada
		11. Sulitnya masyarakat untuk mendapatkan pupuk, obat-obatan dan bibit pertanian	Lokasi ada
		12. Tingginya minat masyarakat untuk usaha ternak Sapi	Lokasi dan tenaga kerja ada
		13. Tingginya minat masyarakat untuk usaha ternak ayam	Lokasi ada
		14. Tingginya minat masyarakat untuk usaha ternak ikan	Lokasi ada
		15. Sulitnya masyarakat untuk mendapatkan bibit Holtikultura	Lokasi ada
		16. Belum adanya jembatan gantung	Matrial dan Lahan ada
		17. Tidak adanya ambulan Nagari	Masyarakat ada
		18. Kurang baiknya saluran pembuangan air limbah rumah tanga dan hujan	Masyarakat ada Lahan ada
		19. Kurangnya penerangan lampu jalan	Listrik ada
		20. Rumah masyrakat masih banyak tidak layak huni	Dana ada

		21. Masih banyak masyarakat belum memiliki Wc	Dana ada
2.	Penadah Mudik	1. Kurang lancarnya pembuangan air sehingga terjadinya banjir	Sawah atau lahan perkebunan
		2. Tidak mempunya masyarakat untuk membeli bibit ternak sapi	Petani dan lahan ada
		3. Sering terjadinya kekurangan air pada lahan pertanian	Lahan dan tenaga lokal
		4. Masyarakat sulit untuk mendapatkan bibit unggul	Petani dan lahan ada
		5. Sering terjadinya banjir pada lahan perkebunan masyarakat saat hujan deras	Lahan dan tenaga lokal
		6. Sulitnya masyarakat membawa hasil usaha tani ke lokasi pemukiman	Lahan dan tenaga lokal
		7. Masyarakat kurang mengenal tentang pendidikan komputer	Masyarakat ada
		8. Meningkatkan keterampilan menjahit	Masyarakat ada
		9. Kurangnya keterampilan tentang perbengkelan	Masyarakat ada
		10. Tanah Masyarakat sering Erosi saat musim hujan	Matrial alam ada
		11. Kurang mempunya orang tua murid untuk membayar honor guru PAUD	Gedung paud dan murid ada
		12. Tidak ada Aula	Lahan ada
		13. Banyaknya jumlah masyarakat yang kurang mampu memenuhi kebutuhan pokok	Lahan dan SDM ada
		14. Banyaknya masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tetap	Lahan dan SDM ada
		15. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap Pegawai Masjid	Masyaraka ada
		16. Tingginya minat masyarakat untuk mengembangkan usaha kecil	Lokasi dan maasyarakat ada
		17. Sulitnya masyarakat untuk mendapatkan pupuk, obat-	Lahan pertanian ada

		obatan dan bibit pertanian	
		18. Tingginya minat masyarakat untuk usaha ternak Sapi	Lokasi ada
		19. Tingginya minat masyarakat untuk usaha ternak ayam	Lokasi ada
		20. Tingginya minat masyarakat untuk usaha ternak ikan	Lokasi ada
		21. Sulitnya masyarakat untuk mendapatkan bibit Holtikultura	Lahan ada
		22. Tidak adanya jembatan gantung	Lahan ada
		23. Tidak adanya ambulan nagari	Masyarakat ada
		24. Kurangnya penerangan jalan	Listrik ada
		25. Tidak adanya balai pemuda	Lahan ada
		26. Kurang lancarnya irigasi persawahan	Lahan ada Petani ada
		27. Kurang lancarnya pembuangan air jalan	Lahan ada
		28. Masih adanya rumah tidak layak huni	Dana ada
		29. Masih banyak masyarakat tidak memiliki WC	Dana ada

BAB III

PROSES PENYUSUNAN RPJM

3.1 Pengkajian Keadaan Nagari

a. Pengertian

Pengkajian keadaan Nagari adalah Proses Penggalan dan Pengumpulan Data mengenai keadaan masyarakat, masalah, potensi dan informasi terkait, yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi dan dinamika masyarakat Nagari.

b. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan menggali secara objektif, lengkap dan cermat tentang:

- 1) Potensi Nagari
- 2) Permasalahan yang dihadapi
- 3) Kebutuhan Masyarakat

c. Pendamping Desa

Kegiatan Pengkajian Nagari difasilitasi oleh Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa Wali Nagari, Sekretaris Nagari, LPMN, BAMUS Nagari dan Perangkat Nagari lainnya.

d. Pendekatan dan Metode

- 1) Penyelarasan Data Terbaru Nagari (lihat lampiran permendagri 114/2014)
- 2) Pengkajian Nagari dilakukan secara Partisipatif dengan menggunakan Metode Partipatory Rural Aprisal (PRA) melalui Sketsa Nagari, Diagram Venn dan Kalender Musim.
- 3) Solusi dan Tindakan

e. Alat Kajian dan Instrumen

Alat kajian yang digunakan adalah Peta Sosial Nagari, Kalender Musim dan Bagan Hubungan antar Lembaga. Instrumen yang digunakan adalah Form-form b (masukan) dan c (poses) sesuai lampiran Permendagri nomor 114 tahun 2014.

f. Proses

- 1) Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan ditingkat kelompok atau kampung untuk menemukan Potensi, masalah dan kebutuhan Masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut diatas.
- 2) Memfasilitasi masyarakat dimaksud melakukan pengelompokan dan penentuan peringkat masalah.
- 3) Memfasilitasi Masyarakat dimaksud melakukan pengkajian, tindakan, dan pemecahan masalah.
- 4) Memfasilitasi masyarakat dimaksud melakukan Penentuan tingkat peringkat tindakan

g. Waktu Pelaksanaan

Durasi (lamanya) waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengkajian kedaan Nagari disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Nagari yang bersangkutan

h. Hasil

Hasil dari kegiatan ini adalah :

- 1) Data Potensi Nagari
- 2) Data Permasalahan
- 3) Data Kebutuhan/Peringkat tindakan sesuai matrik lampiran Permendagri Nomor 114 tahun 2014

3.1.1 Pengkajian Keadaan Nagari Berdasarkan Peta/ Skeksa Nagari

Gambar.4 Pengkajian Keadaan Nagari Berdasarkan Peta/ Skeksa Nagari

Tabel 11. Pengkajian Keadaan Nagari Berdasarkan Peta/ Skeksa Nagari

No	Kampung	Masalah	Potensi
1.	Bidang Pemerintahan Nagari		
	Nagari Limau Purut Tapan	1. Kantor Wali Nagari belum memadai	Lahan ada
		2. Batas Nagari belum Jelas	Lahan Ada
		3. Kantor Bamus Belum Ada	Lahan ada
		4. Mobiler Kantor belum memadai	Perangkat ada
		5. Kurangya kemampuan perangkat nagari mengoperasikan komputer	Perangkat ada
		6. Terbatasnya sumber daya perangkat Nagari	Perangkat ada
		7. Perangkat nagari belum memahami secara jelas tugas dan fungsinya	Perangkat ada
		8. Belum memadainya kendaraan operasional kantor wali nagari	Dana ada
		9. Belum adanya gedung balai pertemuan Nagari	Lahan ada
		10. Pelayanan masyarakat masih bersifat sentralistik	Perangkat ada
		11. Belum adanya gudang penyimpanan inventaris kantor	Inventaris ada
2.	Bidang Pembangunan		
	Kampung Penadah Hilir	1. Tidak lancarnya transportasi di jalan Menuju Persawahan Lubuk Kubu	Persawahan dan lahan ada
		2. Tidak lancarnya transportasi di jalan Menuju Persawahan Lubuk Resam	Persawahan dan lahan ada
		3. Tidak lancarnya irigasi Persawahan Lubuk Kubu	Sawah 55 Ha
		4. Tidak lancarnya Irigasi Menuju Persawahan	Sawah 30 Ha

		Lubuk Resam	
		5. Sangat sulit bagi petani membawa hasil pertanian untuk membawa ke rumah karna tidak ada jalan usaha tani	- Lahan ada - Matrial ada - Tenaga Ada
		6. Jalan PNPM 2008 Masih sulit dilewati ketika Hujan	- Matrial Loka ada - Tenaga Loka ada - Lahan ada
		7. Belum adanya jembatan gantung menuju Sungai Betung	- Matrial ada - Tenaga ada - Lahan ada
		8. Belum adanya jembatan gantung menuju Lubuk Kubu	- Matrial ada - Tenaga ada - Lahan ada
		9. Belum adanya jembatan gantung menuju Lubuk Resam	- Matrial ada - Tenaga ada - Lahan ada
		10. Belum adanya jembatan gantung menuju Talang Balarik	- Matrial ada - Tenaga ada - Lahan ada
		11. Belum adanya lapangan bola kaki	- Pemuda ada
		12. Gedung PAUD belum ada	- Lahan ada - Tenaga lokal ada - Guru ada - Murid ada
		13. Belum memadainya grenace	- Matrial ada - Lahan ada - Tenaga ada
		14. Belum adanya tempat pembuangan sampah	- Lahan ada
		15. Belum adanya poskesri	- Lahan ada
		16. Masih banyak rumah tidak layak huni	- Matrial ada - Tenaga loka ada - Masyarakat ada
		17. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki WC	- Matrial ada - Masyarakat ada - Tenaga lokal ada
		18. Belum adanya pagar bagian belakang SD No	- Matrial ada - Tenaga ada

		17	- SD ada
		19. Jarak tempuh ke SMA jauh	- Murid ada
		20. Jalan ke Kantor wali Rusak	- Jalan ada - Matrial ada - Kantor wali ada
		21. Masjid Masih terbangklai	- Matrial ada - Masjid ada - Tenaga lokal ada
		22. Belum memadainya lapangan bola Volly	- Lahan ada - Pemuda ada - Tenaga loka ada
		23. Kegiatan yandu masih menumpang rumah masyarakat	- Kader ada - Bidan ada - Anak-anak ada
		24. Belum adanya gedung MDA	- Lahan ada - Tenaga loka ada
		25. Belum adanya Pengaman tebing tanah masyarakat	- Matrial ada - Lahan ada - Tenaga ada
		26. Belum adanya gedung kesenian	- Lahan ada - Masyarakat ada
	Kampung Penadah Mudik	1. Tidak lancarnya transportasi di jalan Menuju Persawahan Lubuk Neri	Persawahan dan lahan ada
		2. Tidak lancarnya transportasi di jalan Menuju Persawahan Lubuk Petai	Persawahan dan lahan ada
		3. Tidak lancarnya irigasi Persawahan Lubuk Neri	Sawah 25 Ha
		4. Tidak lancarnya Irigasi Menuju Persawahan Lubuk Petai	Sawah 10 Ha
		5. Sangat sulit bagi petani membawa hasil pertanian untuk membawa ke rumah karna tidak ada jalan usaha tani air Melanacar	- Lahan ada - Matrial ada - Tenaga Ada
		6. Jalan Usaha Tani Air Melancar Masih sulit	- Matrial Loka ada

		dilewati ketika Hujan	- Tenaga Loka ada - Lahan ada
		7. Belum adanya jembatan gantung menuju Lubuk Neri	- Matrial ada - Tenaga ada - Lahan ada
		8. Belum adanya jembatan gantung menuju Lubuk Air Melancar	- Matrial ada - Tenaga ada - Lahan ada
		9. Belum adanya jembatan gantung menuju Lubuk Resam	- Matrial ada - Tenaga ada - Lahan ada
		10. Belum adanya Jalan Usaha Tani menuju Sungai sikai	- Matrial ada - Tenaga ada - Lahan ada
		11. Belum adanya lapangan bola kaki	- Pemuda ada
		12. Gedung PAUD belum ada	- Lahan ada - Tenaga lokal ada - Guru ada - Murid ada
		13. Belum memadainya grenace	- Matrial ada - Lahan ada - Tenaga ada
		14. Belum adanya tempat pembuangan sampah	- Lahan ada
		15. Belum adanya gedung Balai Pemuda	- Lahan ada - Matrial Ada
		16. Masih banyak rumah tidak layak huni	- Matrial ada - Tenaga loka ada - Masyarakat ada
		17. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki WC	- Matrial ada - Masyarakat ada - Tenaga lokal ada
		18. Belum adanya pagar MDA	- Matrial ada - Tenaga ada - MDA
		19. Jarak tempuh ke SMA jauh	- Murid ada
		20. Belum adanya Pagar Poskesri	- Jalan ada - Matrial ada - Poskesri ada
		21. Masjid Masih	- Matrial ada

		terbangkalai	- Masjid ada - Tenaga lokal ada
		22. Belum memadainya lapangan bola Volly	- Lahan ada - Pemuda ada - Tenaga loka ada
		23. Kegiatan yandu masih menumpang rumah masyarakat	- Kader ada - Bidan ada - Anak-anak ada
		24. Belum Memadainya Pos Ronda	- Lahan ada - Tenaga loka ada - Pemuda ada
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat Nagari		
	Kampung Penadah Hilir	1. Pembinaan anggota TP-PKK	- PKK ada - Kegiatan ada
		2. Pembinaan kelompok lembaga ada	- Kegiatan ada - Anggota ada
		3. Pembinaan anggota masjlis tahklm	- Kegiatan ada - Anggota ada
		4. Pembinaan kelompok remaja masjid	- Kegiatan ada - Anggota ada
		5. Pembinaan pemuda	- Kegiatan ada - Pemuda ada
		6. Pembinaan kelompok tani	- Kegiatan ada - Kelompok tani ada - Anggota ada
		7. Pembinaan kader	- Kegiatan ada - Kader ada
		8. Pembinaan anggota LPMN	- Kegiatan ada - Anggota ada
		9. Pembinaan anak-anak TPQ	- Kegiatan ada - Anak-anak ada
	Kampung Penadah Mudik	1. Pembinaan anggota TP-PKK	- PKK ada - Kegiatan ada
		2. Pembinaan kelompok lembaga adat	- Kegiatan ada - Anggota ada
		3. Pembinaan anggota masjlis tahklm	- Kegiatan ada - Anggota ada
		4. Pembinaan kelompok remaja masjid	- Kegiatan ada - Anggota ada
		5. Pembinaan pemuda	- Kegiatan ada - Pemuda ada
		6. Pembinaan kelompok tani	- Kegiatan ada - Kelompok tani

			ada
		7. Pembinaan kader	- Anggota ada - Kegiatan ada - Kader ada
		8. Pembinaan anggota LPMN	- Kegiatan ada - Anggota ada
		9. Pembinaan anak-anak TPQ	- Kegiatan ada - Anak-anak ada
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari		
	Kampung Penadah Hilir	1. Kurangnya kemampuan Kelompok Tani yakni sebagai berikut : - KT. Rimba Sumber Harapan - Kt. Kasai Condong - KT. Ngalau Indah - KT. Kato Sepakat - KT. Lubuk Kubu 1 - KT. Lubuk Kubu 2 - KT. Sungai Sosang - KT. Sungai Gambir Indah - KT. Lubuk Resam - KT. Sungai Betung - KT. Amanah - KT. Maju Bersama - KT. Gambir Hijau - KT. Batang Tapan - KT. Lubuk Kubu Jaya - KT. Gunung Hijau - KT. Sungai Banyak - KT. Batang Tapan Indah - KT. Makmur - KT. Lubuk Panjang	- Petani ada - Lahan ada - Kelompok ada
		2. Memberikan bantuan alat Pengepaan Gambir pada Kelompok - KT. Sungai Gambir Indah - KT. Gambir Hijau - KT. Sungai Sikai - KT. Sungai	- Petani ada - Lahan ada - Gambir ada - Kelompok ada

		Banyak	
		3. Memberikan bantuan Bibit(Karet, Padi, Jagung, Gambir, dll) kepada kelompok berikut : - KT. Rimba Sumber Harapan - Kt. Kasai Condong - KT. Ngalau Indah - KT. Kato Sepakat - KT. Lubuk Kubu 1 - KT. Lubuk Kubu 2 - KT. Sungai Sosang - KT. Sungai Gambir Indah - KT. Lubuk Resam - KT. Sungai Betung - KT. Amanah - KT. Maju Bersama - KT. Gambir Hijau - KT. Batang Tapan - KT. Lubuk Kubu Jaya - KT. Gunung Hijau - KT. Sungai Banyak - KT. Batang Tapan Indah - KT. Makmur. - KT. Lubuk Panjang	- Petani ada - Lahan ada - Kelompok ada
		4. Kurangnya kemampuan TP- PKK dalam hal menjahit	- Anggota ada - Kegiatan ada
		5. Kurangnya kemampuan masyarakat tentang Bordil pada TP-PKK	- Anggota ada - Kegiatan ada
		6. Kurangnya kemampuan masyarakat tentang Pembuatan Kue pada TP- PKK	- Anggota ada - Kegiatan ada
		7. Memberikan bea siswa pendidikan	- Siswa ada
		8. Kurangnya kemampuan masyarakat siswa	- Siswa ada

		SMA, SMP dan SD dalam belajar	
		9. Kurangnya kemampuan masyarakat tentang komputer pada peajar	- Siswa ada
		10. Pengadaan Perlengkapan Seni budaya Lokal	- Tradisi ada - Kegiatan ada
		11. Kurangnya kemampuan masyarakat tentang silat	- Masyarakat ada
		12. Kurangnya kemampuan masyarakat tentang Randai	- Tradisi ada - Masyarakat ada
		13. Pengadaan pelatihan membuat Sirih Gdang	- Murid ada - Guru ada
		14. Kurangnya kemampuan Pemuda tentang olahraga	- Pemuda ada
		15. Kurangnya kemampuan masyarakat tentang Beternak ayam	- Masyarakat ada
		16. Kurangnya kemampuan masyarakat tentang Beternak sapi	- Masyarakat ada
		17. Kurangnya kemampuan masyarakat tentang Perbengkelan	- Masyarakat ada
		18. Kurangnya kemampuan masyarakat tentang budi daya lele	- Masyarakat ada - Pelatih ada
		19. Kurangnya kemampuan masyarakat tentang budi daya Belut	- Masyarakat ada
		20. Pengadaan pelatihan Kepada perangkat Nagari	- Perangkat ada
		21. Pengadaan pelatihan kepada pengurus bumrag	- Pengguru ada - Pelatih ada
		22. Pengadaan permodalan BUMNAG	- Pengurus ada - Kegiatan ada
		23. Kurangnya kemampuan masyarakat tentang kolkulasi karet	- Petani ada - Pelatih ada

	Kampung Penadah Mudik	1. Meningkatkan Kemampuan Kelompok Tani yakni sebagai berikut : - KT. Adi Jaya Pembangunan - Kt. Sungai Betung - KT. Lubuk Baju Ajo - KT. Kato Saiyo - KT. Penadah 1 - KT. Penadah 2 - KT. Alam Jaya - KT. Air Melancar - KT. Tanah Longsor - KT. Harapan Makmur - KT. Lubuk Panjang - KT. Lubuk Gelung - KT. Lubuk Neri - KT. Lubuk Petai	- Petani ada - Lahan ada - Kelompok ada
		2. Memberikan bantuan alat Pengepaan Gambir pada Kelompok - KT. Air Melancar - KT. Lubuk Petai	- Petani ada - Lahan ada - Gambir ada - Kelompok ada
		3. Memberikan bantuan Bibit(Karet, Padi, Jagung, Gambir, dll) kepada kelompok berikut : - KT. Adi Jaya Pembangunan - Kt. Sungai Betung - KT. Lubuk Baju Ajo - KT. Kato Saiyo - KT. Penadah 1 - KT. Penadah 2 - KT. Alam Jaya - KT. Air Melancar - KT. Tanah Longsor	- Petani ada - Lahan ada - Kelompok ada

		- KT. Harapan Makmur - KT. Lubuk Panjang - KT. Lubuk Gelung - KT. Lubuk Neri - KT. Lubuk Petai	
		4. Kurangnya kemampuan masyarakat tentang Mejahit	- Anggota ada - Kegiatan ada
		5. Kurangnya kemampuan masyarakat tentang bordil	- Anggota ada - Kegiatan ada
		6. Kurangnya kemampuan masyarakat tentang usaha kue kepada anggota TP-PKK	- Anggota ada - Kegiatan ada
		7. Memberikan bea siswa pendidikan	- Siswa ada
		8. Memberikan les kepada siswa SD, SMP da SMA	- Siswa ada - Guru ada
		9. Kurangnya kemampuan masyarakat tentang Komputer pada para pelajar	- Siswa ada - Guru ada
		10. Pengadaan Perlengkapan Seni budaya Lokal	- Tradisi ada - Kegiatan ada
		11. Pengadaan pelatihan silat	- Murid ada - Guru ada
		12. Kurangnya kemampuan masyarakat tentang Randai	- Tradisi ada - Masyarakat ada
		13. Kurangnya kemampuan masyarakat tentang membuat Sirih Gdang	- Masyarakat ada - Tradisi ada
		14. Pengadaan pelatihan Olahraga pada Pemuda	- Pemuda ada - Pelatih ada
		15. Kurangnya kemampuan masyarakat tentang Beternak ayam	- Masyarakat ada - Ayam ada
		16. Kurangnya kemampuan masyarakat tentang Beternak sapi	- Masyarakat ada - Sapi ada
		17. Kurangnya kemampuan	- Masyarakat ada

		masyarakat tentang Perbengkelan	
		18. Kurangnya kemampuan masyarakat tentang budi daya lele	- Masyarakat ada
		19. Kurangnya kemampuan masyarakat tentang budi daya Belut	- Masyarakat ada
		20. Kurangnya kemampuan perangkat Nagari	- Perangkat ada
		21. Kurangnya kemampuan pengurus bumrag	- Pengurus ada
		22. Kurangnya kemampuan masyarakat tentang sholat jenazah	- Masyarakat ada - Pelatih ada
		23. Mengadakan pelatihan khotbah jum,at	- Peserta ada - Pelatih ada
		24. Pengadaan permodalan BUMNAG	- Pengurus ada - Kegiatan ada
		25. Kurangnya kemampuan masyarakat tentang kolkulasi karet	- Petani ada - Kebun ada
5.	Tanggap Darurat		
	Nagari Limau Purut Tapan	1. Banjir terjadi bila curah hujan tinggi	- Masyarakat ada - Air ada
		2. Sering terjadi longsor	- Gunung ada

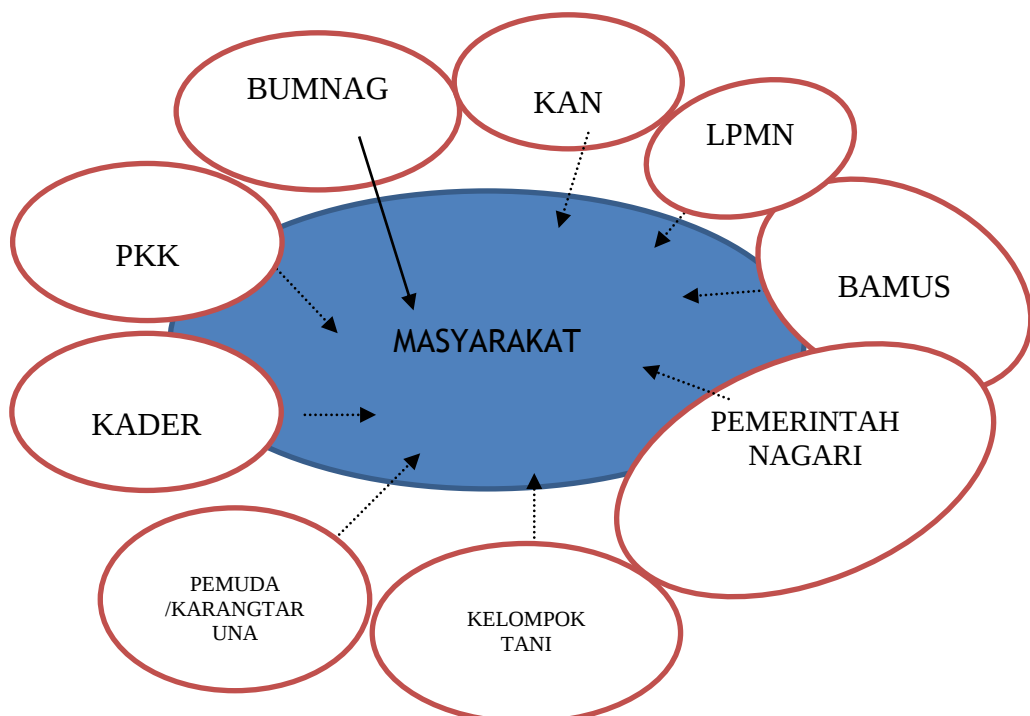
3.1.2 Pengkajian Nagari Berdasarkan Badan Kelembagaan

Pengkajian keadaan nagari menggunakan bagan kelembagaan dilaksanakan dengan cara :

1. Tim penyusun RPJMNag telah melakukan identifikasi kelembagaan yang ada dinagari Aur Duri Surantih Melalui rembuk Kampung / Penggalan gagasan sebagai Berikut :

- 1) Pemerintah Nagari
- 2) Bamus
- 3) LPMN
- 4) PKK
- 5) KAN
- 6) BUMNAG

- 7) Pemuda / Karang Taruna
 - 8) Kader
 - 9) Kelompok Tani
 - 10) Majelis Taklim
 - 11) TPA / TPSA
 - 12) Dst
2. Setelah dilakukan identifikasi kelembagaan oleh Tim RPJMNag menyampaikan kepada peserta Musyawara tentang dampak dan hubungan dapat disimpulkan bahwa besar atau kecil lingkaran dan jauh atau dekatnya menggambarkan kondisi hubungan antar kelembagaan, Pemerintah Nagari dengan masyarakat.



Gambar.5 Diagram Venn Nagari Limau Purut Tapan

Tabel 12. Masalah dan Potensi Pengkajian Keadaan Nagari Berdasarkan bagan Kelembagaan

No	Lembaga	Masalah	Potensi
1	Pemerintahan Nagari	1. Gedung Kantor Wali Nagari belum Memadai	- Lahan ada - Gedung ada
		2. Perangkat Nagari belum paham tukpoksi	- Perangkat ada
		3. Mobiler kantor belum lengkap	- Kantor ada
		4. Kendaraan dinas belum memadai	- Perangkat ada
		5. Pelayanan kepada masyarakat belum maksimal	- Perangkat ada - Masyarakat ada
2	Bamus Nagari	1. Bamus Masih berkantor di rumah masyarakat (kontrak)	- Bamus Ada
		2. Mobiler bamus belum lengkap	- Kantor ada
		3. Belum ada kendaraan operasional bamus	- Anggota bamus ada
		4. Anggota bamus nagari belum memahami Tupoksinya	- Anggota Bamus ada
		5. Tunjangan kehormatan bamus masih belum memada	- Anggota bamus ada
3	LPMN	1. Anggota LPMN tidak memahami tupoksinya	- Anggota LPMN ada
		2. Anggota LPMN tidak berperan sebagaimana mestinya	- Anggota LPMN ada
		3. Tidaknya anggaran untuk kesejahteraan anggota LPMN	- Anggota LPMN ada
		4. LPMN kurang peduli terhadap	- Anggota LPMN ada

		pembangunan nagari	
4	Kerapatan Adat Nagari	1. Kantor KAN masih 1 yakni di Pusat Kecamatan	- KAN ada
		2. Kurang memadainya peranan KAN terhadap Nagari	- KAN ada
		3. Tidaknya kegiatan KAN dalam Nagari	- KAN ada
5	TP- PKK	1. Kegiatan TP- PKK kurang terencana dengan baik	- Pengurus TP- PKK ada - Kegiatan ada
		2. Kurangnya kegiatan TP-PKK Nagari	- TP-PKK ada - Kegiatan ada
		3. Kurangnya anggota TP – PKK memahami Tukpoksinya	- TP- PKK ada
6	Kelompok Tani	1. Kurangnya peran Gapotan dalam kegiatan Nagari	- Gapoktan ada
		2. Kurangnya Koordinasi Gapoktan dengan pemerintahan Nagari	- Gapoktan ada - Pemerintahan nagari ada
7	Karang Taruna	1. Kegiatan Karang Taruna kurang terencana dengan baik	- Karang Taruna ada - Kegiatan ada
		2. Sarana Karang Taruna belum Memadai	- Karang Taruna ada
8	Majlis Takhlím	1. Peran Majlis Tahklím kurang signifikan terhadap pembentukan ahklak masyarakat	- Kegiatan ada - Masjlis tahklím ada
		2. Kegiatan masjlim tahlím kurang terencana dan	- Kegiatan ada - Majilis ada

		berkelanjutan	
9	BUMNAG	1. Pengurus BUMNAG kurang paham dalam menjalankan tugasnya	- Pengurus ada
		2. Permodalan BUMNAG belum memadai	- Usaha ada
		3. Usaha Bumrag masih belum bisa dikembangkan	- Usaha ada

3.1.3 Pengkajian Nagari berdasarkan Kelender Musim

Tabel 13. Kalender Musim

KEGIATAN/ BULAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES
A. IKLIM												
▪ HUJAN												
▪	x	X	X	xx	Xx	xx	xx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx
▪ KEMARA U												
▪ Panca roba												
B. PENGOLAH AN LAHAN												
▪ TANAM	△							△			△	△
▪ PANEN		öö	Öö									öö
▪ PACAKLIK				×	×	×	×					
▪ HAMA PENYAKIT	Ö							Ö			Ö	Ö
▪ PEMASARAN HASILPERTA NIAN		✓	✓					✓			✓	✓

X = Sedikit

XX = Sedang

XXX = Sering/Kebanyakan

Tabel.14 Pengkajian Nagari Berdasarkan Kalender Musim

No	Musim	Masalah	Potensi
1	KEMARAU (Bulan Januari sampai Mai)	1.Masy kekurangan air Bersih 2.Hasil panen merosot/ Macet 1.Produksi palawija menurun 2.Anak menderita demam	Sungai Sungai,lhn pesawahan dan klp tani Postu
2	HUJAN (Bulan Juli sampai Desember)	1.Banyak masy yang ter Serang diare 2.Sebagian Rumah masyarakat Terendam Air 3.Hasil Palawija Menurun 4.Sebahagian masy tidak Bisa menyadap karet / Ekonomi macet	Posyandu dan Tenaga kesehatan SDM/petani
3	TANAM	1. Petani belum memiliki alat untuk mengolah lahan pertanian yang layak 2. Petani dalam mengerjakan sawah masih tradisional 3. Belum mempunyai tali bandar sawah yang teratur 4. kurangnya modal bagi petani untuk mengolah lahan pertaniannya 5. Hama tanaman menyerang tanaman petani 6. Harga bibit tanaman mahal dan susah didapat 7. Harga Pupuk mahal 8. Masih kurangnya pengetahuan petani dalam pengolahan tanaman padi dan	Tanah dan Material Lahan ada dan petani ada Sungai ada Petani dan lahan ada Petani ada, lahan ada Lahan ada, tenaga ada Petani ada, lahan ada Petani ada

		jagung dll	
4	PANEN	1. Masih banyak petani yang memanen padi secara manual 2. Tidak ada wadah menampung hasil tani warga 3. Petani sering mengalami gagal panen	Petani ada, lahan ada

3.14 Pengelompokan Masalah

Tabel 15. Pengelompokan Masalah

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Pemecahan Masalah	Tindakan yang layak
1	Kantor Wali Nagari belum memadai	Gedung Kecil	Lahan ada	Perlu penambahan ukuran gedung	Pembangunan gedung kantor wali
2	Batas Nagari belum Jelas	Patok batas belum ada	Peta Nagari ada	Perlu pembatas nagari	Pemasangan patok batas nagari
3	Bamus berkantor di rumah masyarakat	Kantor belum ada	Lahan ada	Perlu membangun kantor	Pembangunan kantor bamus
4	Mobiler Kantor	Kurangnya mobiler	Dana ada	Perlu penambahan	Pengadaan mobiler

	belum memadai			mobiler	kantor
5	Kurangnya kemampuan perangkat nagari menjalankan tugasnya	Karna latar belakang pendidikan	Perangkat mau belajar	Peningkatan kapasitas perangkat nagari	Pelatihan peningkatan kapasitas
6	Rapat masih menggunakan masjid atau mushala	Karna aula belum ada	Lahan ada	Perlu aula	Pembangunan aula
7	Tidak lancarnya transportasi di jalan Menuju area persawahan dan perkebunan	Karna jalan usaha tani belum memadai	Jalan ada	Perlu peningkatan jalan	Pengerasan jalan usaha tani
8	Area sawah kekeringan di saat musim kemarau	Karna saluran irigasi tidak lancar	Saluran ada	Perlu adanya perbaikan irigasi	Pembuatan saluran irigasi
9	Di saat hujan para petani tidak bisa pergi ke area pertanian karna air sungai banjir	Karna tidak ada penghubung	Lahan ada dan matrial ada	Perlu adanya sarana penghubung	Pembangunan jembatan gantung
10	Para pemuda main bola kaki masih di lapangan nagari lain	Belum adanya lapangan bola kaki	Lahan ada	Perlu adanya lapangan bola kaki	Pembangunan lapangan bola kaki
11	Anak PAUD masih numpang di Mushala	Gedung PAUD belum ada	Lahan ada	Perlu gedung PAUD	Pembangunan Gedung PAUD

12	Di saat hujan air di jalan raya tidak teraliri dengan baik	Belum memadainya grenace	Lahan ada	Perlu membuat pembuangan	Pembangunan grenace
13	Masyarakat masih membuang sampah sembarangan	Belum adanya tempat pembuangan sampah	Bahan ada	Perlu membuat tempat sampah	Pengadaan tempat sampah
14	Masih banyak rumah tidak layak huni	Perekonomian masyarakat masih lemah	Bahan ada	Perlu rehab rumah	Pembiayaan rumah tidak layak huni
15	Masih banyak masyarakat yang belum memiliki WC	Masyarakat kurang mampu Kesadaran masyarakat kurang	- Bahan ada - Masyarakat mau di bina	Perlu Wc dan pembinaan	Pengadaan WC dan Pembinaan masyarakat tentang kesehatan
16	Murid SD no 17 rawah kecelakaan masuk ke sungai	Belum adanya pagar bagian belakang SD No 17	Bahan ada	Perlu pembatas atau pengaman	Pembangunan pagar belakang
17	Siswa yang tidak memiliki kendaraan sering terlambat kesekolah karna	Belum adanya kendaraan umum	Siswa ada	Perlu angkutan anak sekolah	Pengadaan kendaraan anak sekolah
18	Jalan ke Kantor wali sering terdapat genangan air	Karna jalan rusak	Jalan ada	Perlu peningkatan	Pengaspalan jalan
19	Di saat hari besar Islam Masjid masih sesak	Karna masjid masih terbangkalai	Masjid ada	Perlu pembangunan masjid	Lanjutan pembagunaan masjid
20	Disaat main volly ball	Belum memadainya	Lapangan	Perlu rehab lapangan	Peningkatan sarana dan

	pemuda masih susah	lapangan bola Volly			prasaran olahraga
21	Kegiatan yandu masih menumpang rumah masyarakat	Karna Pos yandu terpadu belum ada	Lahan ada	Perlu tempat POS Yandu terpadu	Pembangunan POS Yandu
22	Disaat banjir tanah masyarakat sering tergerus air	Belum adanya Pengaman tebing tanah masyarakat	Lahan ada	Perlu pengamanan tebing	Pembangunan bronjong
23	Kegiatan kesenian masih numpang	Belum adanya gedung kesenian	Lahan ada	Perlu tempat terpusak kegiatan kesenian	Pembangunan gedung kesenian
24	Anak MDA Penadah Mudik rawan masuk ke sungai batang tapan	Belum adanya pagar MDA	Lahan ada	Perlu pembatas gedung MDA	Pembangunan Pagar gedung MDA
25	Pemuda masih malas ikut meronda	Belum Memadainya Pos Ronda	Pos Ronda ada	Perlu sarana tambahan	Pembelian sarana keamanan
26	Kegiatan TP-PKK masih belum maksimal	Karna kemampuan yang kurang memadai	TP-PKK mau belajar	Perlu pembinaan	Pembinaan anggota TP-PKK
27	Adat istiadat di masyarakat masih belum berjalan baik	Karna pengetahuan yang kurang memadai tentang ada	Masyarakat mau belajar	Perlu Pembinaan tentang ada	Pembinaan kelompok lembaga adat
28	Kurangnya intensifnya kegiatan pengajian	Karna kegiatan yang belum terencana dengan baik	Kelompok pengajian mau belajar	Perlu pembinaan	Pembinaan kelompok pengajian
29	Kurangnya Kemampuan	Karna pengetahuan	Kelompok tani mau	Perlu pelatihan	Peningkatan kapasitas

	n Kelompok tani dalam mengelola hasil pertanian	yang kurang memadai	belajar		kelompok tani
30	Kurangnya kemampuan para kader nagari memahami peranyadala m nagari	Karna kurang mendapatka n petunjuk	Kader mau belajar	Perlu pelatihan	Peningkatan kapasitas kader
31	Kurangnya LPMN memahami peranya dalam nagari	Karna kurang mendapatka n petunjuk	LPMN mau belajar	Perlu pelatihan	Peningkatan kapasitas LPMN
32	Banyaknya kelompok petani gambir tidak bisa memanen gambir	Karna alat pengempaaa n tidak ada	Kebun gambir ada	Perlu alat pengempaan	Memberika n bantuan alat Pengepaan Gambir
33	Hasil panen petani kurang memuaskan	Karna bibit yang kurang baik	Petani ada	Perlu bibit Unggul	Memberika n bantuan Bibit unggul
34	Kurangnya kreatifitas anggota TP- PKK nagari	Karna keterampil an tidak ada	Anggota TP-PKK nagari mau belajar	Perlu Pelatihan keterampilan	Pengadaan pelatihan keterampil an TP-PKK Nagari
35	Masih banyak anak-anak yang tidak bisa melanjutak pendidikan ke jenjang SMA	Karna kurang mampu di segi pembiayaan	Semangat sekolah ada dan anak ada	Perlu diberikan bantuan pendanaan	Memberika n bea siswa pendidikan
36	Rendahnya prestasi belajar para	Kurang bimbingan di rumah	Ingin belajar tinggi	Perlu dilakukan bimbingan	Mengadaka n Bimbingan

	siswa				belajar
37	Kurangnya kemampuan masyarakat tentang Beternak sapi	Karna pengetahuan peternak yang kurang memadai	Peternak mau belajar	Perlu pelatihan tentang ternak	Peningkatan kapasitas peternak sapi
38	Kurangnya kemampuan masyarakat tentang budi daya lele	Karna pengetahuan budi daya lele yang kurang memadai	Petani mau belajar	Perlu pelatihan tentang budi daya lele	Peningkatan kapasitas budi daya lele
39	Kurangnya kemampuan pengurus BUMNAG dalam mengelola usahanya	Pengurus baru terpilih	Penguru mau belajar	Perlu pelatihan kepada pengurus bumnag	Peningkatan kapasitas pengurus bumnag
40	Kurang kompotitifnya usaha BUMNAG	Modal kurang	Usaha ada	Perlu tambahan modal	Pengadaan permodalan BUMNAG
41	Kurangnya kemampuan masyarakat tentang Beternak ayam	Karna ilmu tidak ada	Peternak ayam ada	Pelu pelatihan tentang berternak yang baik	Peningkatan kapasitas peternak ayam
42	Masih adanya anak- anak yang tidak bisa memenuhi kebutuhan gizinya	Dari keluarga yang kurang mampu	Anak-anak ada	Perlu makanan tambahan	Pengadaaan PMT bagi anak-anak

3.2 Musyawarah Nagari RPJM Nagari

Penyusunan RPJMNag di mulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada di Nagari Limau Purut Tapan dengan menggunakan dengan Alat pada :

- a. Sketsa nagari
- b. Kalender Musim
- c. Diagram Kelembagaan

Dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Limau Purut Tapan sampai keluarnya Peraturan Nagari Limau Purut tentang RPJM Nagari Limau Purut Tapan melalui proses-proses sebagai berikut :

a. Musyawarah Nagari

Musyawarah tahap awal ini beragendakan tentang pembentukan Tim RPJM, dengan diterbitkannya SK Tim RPJM (terlampir) Nagari Limau Purut Tapan, yakni Tim RPJM Nagari Limau Purut Tapan sebagai berikut :

- Pembina : Wali Nagari
- Ketua : Herman Siswanto
- Sekretaris : Amril
- Anggota : - Reni Yuliati
 - Syafrul. M
 - Doni
 - Budi
 - Afrizal
 - Mainiwati

Dalam musyawarah tahap awal ini juga disepakati juga jadwal dari setiap tahap penyusunan RPJM Nagari Limau Purut yakni sebagai berikut :

No	Kegiatan	Juli			Agustus				September				Okt	
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1	Musyawarah Nagari	X												
2	Musyawarah Kampung		x	x										
3	Musyawarah Tim RPJM Pembahasan				x									
4	Laporan Pengkajian Keadaan Nagari						x	x						

5	Musyawarah Nagari Penyusun RPJM (Pra Musrenbang)								x	X					
6	Musrenbang Nagari											x	x		
7	Musyawarah wali nagari untuk mengesahkan RPJM Nagari													x	

b. Musyawarah Kampung

Dalam tahap ini tim penyusun RPJM Nagari Limau Purut tapan mengadakan rebuk Kampung yakni Kampung Penadah Mudik dan kampung Penadah Hilir dengan tujuan dan Maksud menampung semua usulan dan masukan dari warga masyarakat Kampung masing-masing tentang program dan kegiatan untuk enam (6) Tahun Ke depan yakni 2019 – 2024. (berita acara terlampir)

c. Musrenbang Nagari

Dalam tahap ini disepakati rancangan penyusunan RPJM Nagari Limau Purut Tapan, menyepakati tim penyusunan RKP Nagari Limau Purut Tapan Tahun 2019, dan juga menyepakati Jadwal Penyusunan RKP tahun 2019.

d. Pelaksanaan Kegiatan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-Nagari)

1. Tujuan penyusunan RPJM-Nagari adalah:

- Merumuskan rencana pembangunan nagari yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat
- Merumuskan arah, tujuan. kebijakan dan strategi pembangunan Nagari
- Menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran
- Meningkatkan peran serta masyarakat di Nagari dalam proses pembangunan.

2. Prinsip Penyusunan RPJM-Nagari

- a. Lengkap artinya RPJM-Nagari mencakup semua aspek pembangunan masyarakat dan Nagari
- b. Cermat artinya data-data dasar diperoleh dan dihimpun secara teliti, objektif dan dapat dipercaya
- c. Sistematis artinya RPJM-Nagari disusun berdasarkan alur pemikiran logis dan sesuai tata susun yang runut
- d. Partisipatif artinya melibatkan semua pihak/pemangku kepentingan secara aktif dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan
- e. Keterbukaan artinya memberikan akses seluas-luasnya kepada para pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi dan mengontrol proses penyusunan RPJM-Nagari

3. Kaidah Penyusunan RPJM-Nagari

- a. RPJM-Nagari sebagai Proses Pemikiran Strategis
- b. RPJM - Nagari sebagai Rangkaian Kegiatan yang Sistematis

4. Tim Penyusun RPJM-Nagari

Jumlah anggota Tim Penyusun sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari:

- a. Wali Nagari
- b. Sekretaris Nagari
- c. 1 (satu) orang Pengurus LPMN.
- d. 1 (satu) orang Kaur Perencanaan
- e. 2 (dua) orang KepalaKampung
- f. 2 (dua) orang wakil masyarakat yang satu diantaranya adalah perempuan

5. Pembentukan Tim Penyusun

- a. Tim Penyusun RPJM Nagari dibentuk dalam forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nagari.

b. Pembentukan Tim dimaksud dilakukan melalui kegiatan:

1) Sosialisasi

Pemerintah Nagari berkewajiban menyebarluaskan informasi dan menjelaskan tentang:

- a) Rencana penyusunan RPJM-Nagari
- b) Proses dan tahapan kegiatan penyusunan RPJM-Nagari
- c) Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nagari
- d) Jumlah, unsur dan tatacara pemilihan anggota Tim Penyusun
- e) Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun RPJM-Nagari.

6. Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nagari

a. Rapat Pembentukan Tim dimaksud diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari

b. Penyelenggaraan Rapat Pembentukan Tim dimaksud mencakup kegiatan:

1) Persiapan

Kegiatan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Nagari untuk mempersiapkan pelaksanaan rapat Tim Penyusun RPJM-Nagari adalah :

- a) Menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nagari
- b) Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan
- c) Menyampaikan surat undangan rapat kepada para calon anggota Tim Penyusun.

2) Pelaksanaan/Proses rapat

Rapat dipimpin oleh Wali Nagari dan Pembahasan susunan acara rapat. Susunan acara dimaksud sekurang-kurangnya mencakup:

- a) Pembukaan
- b) Penjelasan materi rapat. Materi rapat dimaksud. mencakup:
 - i. Penjelasan proses penyusunan RPJM-Nagari

- ii. Penjelasan Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun RPJM-Nagari
 - iii. Penyampaian hasil pendaftaran/perekrutan calon anggota Tim Penyusun
 - iv. Penjelasan ketentuan pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nagari
 - v. Dapat ditambahkan materi lain sesuai kebutuhan.
- c) Proses pemilihan anggota Tim Penyusun RPJM-Nagari
- Proses pemilihan anggota Tim Penyusun RPJM-Nagari dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila musyawarah dimaksud tidak berhasil, maka dilakukan pemungutan suara secara tertutup sesuai aturan yang disepakati forum.
- d) Penetapan anggota Tim Penyusun RPJM-Nagari.
- Anggota Tim Penyusun RPJM-Nagari ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari.
- 3) Proses dan hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nagari dan ditanda tangani oleh semua peserta yang hadir.

7. Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penyusun

- a. Wali Nagari karena jabatannya adalah Penanggung Jawab dan Koordinator Tim Penyusun, bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Memastikan tersosialisasinya agenda penyusunan RPJM-Nagari
 - 2) Memastikan tersosialisasinya agenda pembentukan Tim Penyusun RPJM- Nagari
 - 3) Melaksanakan rekrutmen calon anggota Tim Penyusun RPJM-Nagari
 - 4) Menyelenggarakan rapat pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nagari
 - 5) Mengundang anggota Tim Penyusun
 - 6) Memimpin Rapat Tim Penyusun

- 7) Menerbitkan surat keputusan penetapan anggota Tim Penyusun
- 8) Menugaskan KPMN dan LPMN memfasilitasi pengkajian keadaan Nagari
- 9) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM-Nagari
- 10) Memastikan tersusunnya Rancangan RPJM-Nagari

b. Sekretaris Nagari

Karena jabatannya adalah Sekretaris Tim Penyusun, bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat
- 2) Membantu Wali Nagari mengelola Rapat Tim Penyusun
- 3) Memastikan tersedianya Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nagari
- 4) Memastikan tersedianya dokumen Rancangan RPJM-Nagari

c. Pengurus LPMN, Kepala kampung dan Wakil Masyarakat tersebut di atas adalah sebagai anggota Tim Penyusun. bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Menghadiri rapat Tim Penyusun
- 2) Membahas dan merumuskan Rancangan RPJM-Nagari

8. Asistensi

Tim Penyusun dalam melaksanakan kegiatan penyusunan Rancangan RPJM- Nagari dibimbing dan dibantu oleh aparat pemerintah (kecamatan dan/atau kabupaten) yang berkompeten, Pendamping (kecamatan dan/atau kabupaten), dan pihak lain yang berkompeten.

9. Masa Tugas

Masa tugas Tim Penyusun terhitung sejak diterbitkannya surat penetapan Tim Penyusun RPJM-Nagari oleh Wali Nagari sampai dengan ditetapkannya Pernag tentang RPJM-Nagari oleh Wali Nagari kepada Bamus.

10. Tahapan Kegiatan Penyusunan RPJM-Nagari

a. Persiapan

Pada tahap ini, kegiatan yang harus dilakukan adalah :

- 1) Memastikan kesiapan KPMN dan LPMN
- 2) Memastikan penugasan KPMN dan LPMN melakukan fasilitasi pengkajian keadaan nagari
- 3) Memastikan penerbitan Surat Keputusan Penetapan Tim Penyusun RPJM-Nagari
- 4) Memastikan tersedianya hasil-hasil MMDN dan Penggalan Gagasan tahun sebelumnya sebagai informasi dan bahan pendukung pelaksanaan pengkajian keadaan nagari
- 5) Menetapkan jadwal dan agenda pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM- Nagari
- 6) Menyiapkan sarana, alat dan kebutuhan lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM-Nagari.

e. Pengkajian Keadaan Nagari

Pada tahap ini tim penyusun RPJM Nagari Limau Purut Tapan melakukan pengkajian Keadaan nagari Limau Purut Tapan beberapa tahap yakni sebagai berikut:

- 1) Pengkajian Keadaan Nagari berdasarkan Skeksa Nagari
Menghasilkan peta skeksa nagari dan daftar masalah dan potensi yang ada di nagari Limau Purut Tapan berdasarkan Skeksa Nagari
- 2) Pengkajian keadaan Nagari berdasarkan Bagan kelembagaan yang ada di Nagari.
Menghasilkan daftar masalah dan potensi yang ada di nagari Limau Purut Tapan berdasarkan Bagan Kelembagaan Nagari
- 3) Pengkajian Keadaan Nagari berdasarkan kelender Musim
Menghasilkan daftar masalah dan potensi yang ada di nagari Limau Purut Tapan berdasarkan Kelender Musim
- 4) Pengelompokkan Masalah

Menghasilkan daftar pengelompokan masalah dan potensi, dan penyebab timbulnya masalah serta tindakan yang layak dilakukan oleh pemerinyahan Nagari Limau Purut Tapan.

5) Prioritas tindakan Masalah

Pada tahap terakhir ini dilakukan prioritas dari tindakan masalah yang telah ditentukan.

f. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Nagari

Pada tahap ini Tim Penyusun RPJM Nagari Limau Purut Tapan memberikan Laporan dari Pengkajiaan Keadaan Nagari dengan dihasilkannya berita acara Laporan Pengkajiaan Nagari untuk di koreksi oleh wali Nagari (berita acara terlampir)

3.3 Penyusunan Rancangan RPJM-Nagari

Rancangan RPJM-Nagari dimaksud terdiri dari:

- a. Naskah rancangan kebijakan pembangunan Nagari
- b. Rencana kegiatan pembangunan Nagari.
- c. Sistematika Tata Susun Naskah rancangan kebijakan pembangunan Nagari disusun sesuai sistematika/tata susun sebagaimana Lampiran 1.

3.4 Perumusan Rencana Kegiatan pembangunan Nagari

- a. Rencana kegiatan dimaksud disusun sesuai tabel rencana sebagaimana pada Lampiran 2.
- b. Rencana kegiatan dimaksud disusun berdasarkan `urusan"
- c. Urusan dimaksud dipilah menjadi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan
- d. Urusan Wajib adalah semua aspek dan kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan berhubungan secara langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat/indeks pembangunan manusia. mencakup bidang dan kegiatan: (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Sarana prasarana. (4) Lingkungan hidup. (5) Sosial budaya, (6) Pemerintahan, dan (6) Koperasi dan usaha masyarakat.

- e. Urusan pilihan adalah aspek dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi dan potensi setempat. mencakup: (1) Pertanian, (2) Peternakan ; (3) Perkebunan, (4) Pariwisata. dan (5) Kelautan/Perikanan, (6) Penanggulangan keadaan darurat (bencana/KLB)
- f. Rencana kegiatan dirumuskan dengan menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti.
- g. Rumusan rencana kegiatan bersifat khusus,terukur. dapat diterima, realistis dan jelas kerangka waktunya.

3.5 Rapat Penyusunan

- a. Penyusunan Rancangan RPJM-Nagari dilakukan dalam forum Rapat Tim Penyusun
- b. Rapat dimaksud dipimpin oleh Pimpinan Rapat yang terdiri dari seorang Ketua atau sebutan lain. seorang Wakil Ketua atau sebutan lain dan seorang Sekretaris.
- c. Wali Nagari dan Sekretaris Nagari karena jabatannya adalah ketua dan Sekretaris Rapat Tim Penyusun.
- d. Wakil Ketua Rapat dipilih dari dan oleh anggota Tim Penyusun secara demokratis.
- e. Setiap rapat dimaksud membahas agenda yang telah ditetapkan secara jelas.
- f. Agenda dan tatacara rapat dibahas dan disepakati pada Rapat Pertama Tim Penyusun.
- g. Rapat Tim Penyusun dilakukan beberapa kali sampai tersusun Rancangan RPJM-Nagari yang lengkap dan layak.
- h. Rapat dimaksud dipilah menjadi: (1) Rapat Pleno, dan (2) Rapat Komisi
 - 1) Rapat Pleno
 - Rapat Pleno dimaksud membahas dan merumuskan Naskah Kebijakan Pembangunan Nagari dan membahas hasil Rapat Komisi.
 - Rapat Pleno diikuti oleh semua anggota Tim Penyusun Rapat Komisi
 - 2) Rapat Komisi

- Rapat Komisi dimaksud membahas dan menyusun rencana kegiatan pembangunan Nagari
- Pembentukan Komisi dimaksud memperhatikan "Urusan" dan disesuaikan dengan jumlah anggota Tim dan kebutuhan.
- Rapat Komisi dimaksud dipimpin oleh Pimpinan Rapat Komisi
- Pimpinan Rapat dimaksud terdiri dari seorang Ketua atau sebutan lain dan seorang Sekretaris
- Pimpinan Rapat dimaksud dipilih dari dan oleh anggota Komisi secara demokratis.

3) Waktu Penyusunan

Penyusunan Rancangan dimaksud dilakukan setelah Pengkajian Keadaan Nagari sampai dengan sebelum pelaksanaan Musrenbang Pembahasan Rancangan RPJM-Nagari.

4) Hasil

Kegiatan penyusunan menghasilkan Dokumen Rancangan (Awal) RPJM-Nagari

3.6 Pembahasan Rancangan RPJM-Nagari

a. Forum Pembahasan

- 1) Rancangan (Awal) RPJM-Nagari dibahas bersama masyarakat dalam Forum Musrenbang Nagari.
- 2) Musrenbang dimaksud adalah Forum Musrenbang Nagari yang diselenggarakan khusus, 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun. untuk membahas rancangan (Awal) RPJM-Nagari.

b. Peserta

Pihak-pihak yang wajib diundang sebagai peserta Musrenbang Nagari dimaksud adalah :

- 1) Tim Penyusun
- 2) Wakil kelompok-kelompok masyarakat. Ormas. dan LSM
- 3) Wakil kelompok perempuan
- 4) Wakil masyarakat miskin

- 5) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Nagari
- 6) Dapat mengundang unsur masyarakat lainnya yang dipandang perlu
- 7) Fasilitator
- 8) Proses pembahasan Rancangan RPJM-Nagari difasilitasi oleh tim

c. Proses Pembahasan

Agenda dan proses pembahasan adalah sebagai berikut:

- 1) Pembukaan dan pengarahan oleh Camat
- 2) Pemaparan proses penyusunan Rancangan RPJM-Nagari oleh Wali Nagari
- 3) Pemaparan pokok-pokok materi Rancangan (Awal) RPJM-Nagari oleh Tim Penyusun
- 4) Tanggapan, masukan dan saran dari peserta Musrenbang Nagari
- 5) Tanggapan balik Wali Nagari Tim Penyusun
- 6) Pembahasan oleh peserta
- 7) Pembahasan dimaksud dilakukan dalam kelompok-kelompok diskusi.
- 8) Jumlah kelompok dimaksud disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan
- 9) Kelompok diskusi dimaksud dipimpin oleh pimpinan diskusi. yang terdiri dari seorang Ketua atau sebutan lain dan seorang sekretaris.
- 10) Pimpinan diskusi dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi secara demokratis.
- 11) Penyampaian hasil-hasil pembahasan peserta Musrenbang
- 12) Penjelasan tindak lanjut hasil pembahasan Rancangan RPJM-Nagari oleh Wali Nagari.

d. Penutupan oleh Wali Nagari

e. Hasil

Hasil proses pembahasan dimaksud adalah Rancangan (Akhir) RPJM-Nagari.

3.7 Penetapan Rancangan RPJM-Nagari

a. Forum Penetapan

- 1) Rancangan (Akhir) RPJM-Nagari ditetapkan dalam Forum Rapat BAMUS. Yang diselenggarakan oleh dan sesuai Peraturan Tata Tertib BAMUS
- 2) Rapat dimaksud dipimpin oleh Pimpinan BAMUS.

b. Peserta Rapat

Peserta Rapat BAMUS untuk penetapan Rancangan Peraturan Nagari tentang RPJM-Nagari adalah :

- 1) Semua Anggota BAMUS
- 2) Wali Nagari
- 3) Sekretaris Nagari
- 4) Semua Kasi, Kepala Urusan (Kaur) Pemerintah Nagari
- 5) Anggota Tim Penyusun Rancangan RPJM-Nagari
- 6) Wakil masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan kelompok perempuan dan masyarakat miskin.
- 7) Pengurus Ormas dan/atau LSM
- 8) Unsur masyarakat lainnya

c. Sifat Rapat

- 1) Rapat BAMUS untuk penetapan Pernag tentang RPJM-Nagari bersifat terbuka untuk umum
- 2) Penetapan/Pengesahan
- 3) Rancangan (Akhir) RPJM-Nagari ditetapkan dan disahkan dengan Peraturan Nagari (Pernag)

3.8 Pengajuan Rancangan Pernag

Wali Nagari wajib mengajukan Rancangan Pernag tentang RPJM-Nagari kepada BAMUS. paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang Nagari Pembahasan Rancangan (Awal) RPJM-Nagari

a. Penetapan Jadwal Pembahasan dan Penetapan oleh BAMUS

- 1) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Rancangan Pernag dimaksud diterima. BAMUS menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Penetapan Rancangan Pernag tentang RPJM-Nagari

- 2) Rapat Penetapan dimaksud dilaksanakan selambat- lambatnya 2 (dua) minggu setelah Rancangan Pernag tentang RPJM-Nagari diterima.
- b. Proses Rapat Penetapan
 - 1) Pembukaan dan Pengantar Rapat oleh pimpinan Rapat
 - 2) Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Nagari tentang RPJM-Nagari oleh Wali Nagari
 - 3) Tanggapan Anggota BAMUS
 - 4) Jawaban Wali Nagari (Tim Penyusun)
 - 5) Pengambilan Keputusan/Penetapan Pernag tentang RPJM- Nagari
 - 6) Penandatanganan naskah Pernag oleh Wali Nagari dan Ketua BAMUS.
 - 7) Hasil
 - 8) Peraturan Nagari (Pernag) tentang RPJM-Nagari

3.9 Sumber Dana

Pembiayaan yang timbul dari kegiatan penyusunan RPJM-Nagari dipenuhi dari sumber dana:

- a. APBD Kabupaten/Kota
- b. APBD Propinsi
- c. APBN
- d. APB Nagari
- e. Sumber lain yang tidak mengikat
- f. Swadaya Masyarakat

BAB IV

VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF (ENAM TAHUN)

4.1 Visi Wali Nagari

Rumusan visi dan misi digali berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat yang kemudian dirumuskan tentang visi kedepan. Sehingga rumusan visi harus sejalan dengan ciri-ciri khas atau unik masyarakat kedepan. Rumusan visi tersebut perlu dirumuskan ke dalam misi capaian program yang akan dilaksanakan diantara masyarakat Nagari. Hasil penggalan visi dan misi.

4.1.1 Visi

Visi Nagari Limau Purut Tapan

” Membangun Nagari yang Berkeadilan, Berpendidikan dan Agamais”

4.2 Misi Wali Nagari

Misi untuk mencapai visi nagari Limau Purut Tapan antara lain :

1. Menciptakan Pemerintahan nagari yang bersih dan Meningkatkan Pelayanan Terhadap Masyarakat.
2. Menciptakan Pelayanan Masyarakat Nagari Limau Purut Tapan untuk beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta meningkatkan peran fungsi Masjid sebagai pusat utama Dakwah dalam Nagari serta pendidikan Agama bagi masyarakat.
3. Membentuk masyarakat yang aman dan tentram serta memotivasi masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan dan adat yang ada dalam nagari.
4. Menciptakan generasi muda yang berprestasi, baik di bidang seni dan olahraga.
5. Meningkatkan Peran Lembaga Masyarakat dalam rangka pembangunan nagari.
6. Mensejahterakan Perekonomian Masyarakat.
7. Memberikan bantuan dana BUMNAG

8. Meningkatkan sarana dan prasana fisik yang berorientasi kepada peningkatan ekonomi masyarakat

Tabel.16 Sinkronisasi Misi RPJM Kabupaten Dengan Misi RPJM Nagari Limau Purut Tapan

Misi RPJM Kabupaten Pesisir Selatan		Misi RPJM Nagari Limau Purut Tapan	
1	Melaksanakan Reformasi birokrasi dengan Aparatur yang bersih dan Responsive dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kepada masyarakat	1	Menciptakan Pemerintahan nagari yang bersih dan Meningkatkan Pelayanan Terhadap Masyarakat
2	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perekonomian dan Infrastruktur Sosial yang terkait dengan Sektor Unggulan Daerah	8	Meningkatkan sarana dan prasana fisik yang berorientasi kepada peningkatan ekonomi masyarakat
3	Meningkatkan Kehidupan beragama yang rukun, toleran, dan mengembangkan nilai nilai budaya ABS-SBK	2	Menciptakan Pelayanan Masyarakat Nagari Limau Purut Tapan untuk beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta meningkatkan peran fungsi Masjid sebagai pusat utama Dakwah dalam Nagari serta pendidikan Agama bagi masyarakat
4	Meningkatkan Produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan	6	Mensejahterakan Perekonomian Masyarakat.
5	Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang	5	Meningkatkan Peran Lembaga Masyarakat dalam rangka pembangunan nagari

4.3 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nagari

Arah kebijakan umum merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program Wali Nagari terpilih sebagai arah bagi aparat pemerintah nagari, guna mencapai kinerja sesuai tugas dan fungsinya. Secara rinci arah kebijakan umum beberapa sektor penting adalah sebagai berikut.

a. Sub Bidang Pertanian

Arah kebijakan umum pembangunan pertanian adalah kecukupan pangan, penganeekaragaman komoditas, fasilitasi pemberdayaan petani miskin dan peningkatan pendapatan petani.

Prioritas Pembangunan

- 1) Pengerasan Jalan Usaha Tani
- 2) Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani
- 3) Pembangunan Jembatan Gantung

b. Sub Bidang Pendidikan

Arah kebijakan umum pembangunan pendidikan adalah peningkatan melek huruf, khususnya wajib belajar 9 tahun dan fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan.

- 1) Pembangunan Gedung PAUD
- 2) Pembangunan Pagar Belakang SDN 17 Sungai Gambir
- 3) Pembangunan Pagar Gedung MDA
- 4) Pengadaan Kendaraan Anak Sekolah
- 5) Mengadakan Bimbingan Belajar
- 6) Pembangunan Gedung Kesenian
- 7) Memberiakan Bea siswa Pendidikan

c. Sub Bidang Kesehatan

Arah kebijakan umum pembangunan kesehatan adalah penurunan angka kematian kasar (bayi dan ibu hamil). Peningkatan gizi anak, peningkatan kesehatan lingkungan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat terutama keluarga miskin.

- 1) Pengadaan WC dan pembinaan Masyarakat tentang Kesehatan
- 2) Pengadaan PMT bagi Anak-anak
- 3) Pembangunan POSYANDU

d. Sub Bidang Perekonomian Nagari

Arah kebijakan umum perekonomian nagari adalah peningkatan lapangan kerja, penganekaragaman usaha ekonomi dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan pemanfaatan potensi ekonomi nagari yang berkelanjutan.

Prioritas Kegiatan:

- 1) Memberikan Bantuan Alat Pengepaan Gambir
- 2) Memberikan Bantuan Bibit Unggul
- 3) Peningkatan Kapasitas Ternak Sapi
- 4) Pengadaan Permodalan BUMNAG
- 5) Peningkatan Kapasitas Budi Daya Lele
- 6) Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMNAG
- 7) Peningkatan Kapasitas Peternak Ayam

e. Sub Bidang Lingkungan hidup

Arah kebijakan umum pengembangan lingkungan hidup adalah peningkatan kualitas dan kuantitas lingkungan hidup ditingkat nagari.

Prioritas Kegiatan:

- 1) Pembangunan Aula
- 2) Pembangunan Bronjong
- 3) Pembangunan Drenase
- 4) embuatan Saluran Irigasi
- 5) Pengadaan Tong Sampah
- 6) Lanjutan Pembangunan Masjid
- 7) Pengaspalan Jalan
- 8) Pembelian Sarana Keamanan

f. Bidang Pemerintahan Nagari

Arah kebijakan umum kegiatan pemerintahan nagari adalah penataan kelembagaan pemerintah nagari, peningkatan kinerja aparatur

pemeintah nagari, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan nagari, penguatan dalam pendanaan dan peningkatan pelayanan msyarakat.

Prioritas Kegiatan:

- 1) Pengadaan Mobiler Kantor
- 2) Pemasangan Patok Batas Nagari
- 3) Pembangunan Gedung Kantor Wali Nagari
- 4) Pembangunan Kantor Bamus Nagari

g. Sub Bidang Sosial budaya

Arah kebijakan umum di bidang sosial budaya adalah :

1. Terbentuknya masyarakat yang inovatif, kreatif dan informatif.
2. Terbentuknya masyarakat yang tentram, tertib dan disiplin, beretos kerja tinggi, agamis dan bermoral.
3. Peningkatan peran wanita dalam pelaksanaan pembangunan nagari.
4. Terbentuknya masyarakat yang bebas dari gangguan alam dan penyakit sosial.
5. Pemeliharaan adat istiadat dan seni budaya asli daerah

Prioritas Kegiatan

- a) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat
- b) Pembiayaan Rumah Tidak Layak Huni
- c) Pembinaan TP-PKK
- d) Pembinaan Kelompok Pengajian
- e) Pembangunan Lapangan Bola Kaki
- f) Pengadaan Pelatihan Keterampilan TP-PKK Nagari
- g) Peningkatan Kapasitas LPMN
- h) Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
- i) Peningkatan Kapasitas Kader
- j) Pembinaan Kelompok Lembaga Adat

4.3.1 Prioritas Pembangunan Nagari

Tabel.17 Prioritas pembangunan Nagari

No	Kegiatan	Prioritas
1	Pengerasan Jalan Usaha Tani	I
2	Pengadaan WC dan Pembinaan Masyarakat tentang Kesehatan	II
3	Pembiayaan Rumah Tidak Layak Huni	III
4	Peningkatan Kapasitas Kelompk Tani	IV
5	Pembangunan Gedung PAUD	V
6	Pembangunan Jembata Gantung	VI
7	Pelatihan Peningkatan Kapasitas	VII
8	Pengadaaan Mobiler Kantor	VIII
9	Pembangunan Grenace	IX
10	Pembangunan Aula	X
11	Pengadaan Tempat Sampah	XI
12	Pembangunan Pagar Belakang SD No 17 Sungai Gambir	XII
13	Pembuatan Saluran Irigasi	XIII
14	Memberikan Bantuan Alat Pengepaan Gambir	XIV
15	Memberikan Bantuan Bibit Unggul	XV
16	Peningkatan Kapasitas Peternak Sapi	XVI
17	Pengadaan Permodalan BUMNAG	XVII
18	Peningkatan Kapasitas Budi Daya Lele	XVIII
19	Peningkatan Kapasitas Pengurus Bum nag	XIX
20	Pemasangan Patok Batas Nagari	XX
21	Peningkatan Kapasitas Peternak Ayam	XXI
22	Lanjutan Pembagunan Masjid	XXII
23	Pembinaan Anggota TP-PKK	XXIII
24	Pembinaan Kelompok Pengajian	XXIV
25	Pengaspalan Jalan	XXV
26	Pembagunan Lapangan Bola Kaki	XXVI
27	Pengadaaan PMT Bagi Anak-Anak	XXVII
28	Pengadaan Pelatihan Keterampilan TP-PKK Nagari	XXVIII
29	Pembagunan Pagar Gedung MDA	XXIX
30	Pembelian Sarana Keamanan	XXX
31	Peningkatan Kapasitas LPMN	XXXI
32	Pengadaan Kendaraan Anak Sekolah	XXXII
33	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga	XXXIII
34	Peningkatan Kapasitas Kader	XXXIV
35	Mengadakan Bimbingan Belajar	XXXV
36	Pembangunan Gedung Kesenian	XXXVI
37	Pembinaan Kelompok Lembaga Adat	XXXVII
38	Pembanguna Pos Yandu	XXXVIII

39	Pembangunan Bronjong	XXXIX
40	Memberikan Bea Siswa Pendidikan	XXXX
41	Pembangunan Gedung Kantor Wali	XXXXI
42	Pembangunan Kantor Bamus	XXXXII

4.4 Tujuan Dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Perumusan tujuan dan sasaran menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

b. Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Untuk mencapai misi yang telah ditetapkan maka Nagari Aurduri Surantih perlu menetapkan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi sebagai berikut :

Tabel 18. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : “Membangun Nagari yang Berkeadilan, Berpendidikan dan Agamis”					
No	Misi	Tujuan	Strategi	Sasaran	Arah Kebijakan
1.	Menciptakan Pemerintahan Nagari yang bersih dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat	Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas	1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nagari; 2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Nagari;	Pemerintahan Nagari dan Lembaga lain yang ada di dalamnya	• Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan • Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan

			3. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas;		
		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan	1. Meningkatkan Sanitasi Lingkungan di Perumahan Warga 2. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana Pengelolaan Persampahan 3. Meningkatkan Pengendalian Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan. Dan 4. Meningkatkan Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan	Khususnya Masyarakat Nagari Limau Purut Tapan	• Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan
2.	Membentuk masyarakat yang aman dan tentram serta memotivasi masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan dan adat yang ada dalam nagari	Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban dan Kenyamanan bagi Kehidupan Bermasyarakat	1. Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Masyarakat yang Pancasila 2. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 3. Sertifikasi Tanah Milik Pemda dan Masyarakat. Dan 4. Meningkatkan Kepemilikan	Masyarakat Nagari Limau Purut Tapan bekerjasama dengan Pemerintahan Nagari dalam meningkatkan potensi Nagarinya	• Peningkatan pembinaan kelompok lembaga adat

			Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Masyarakat.		
3.	Menciptakan Pelayanan Masyarakat Nagari Limau Purut Tapan untuk beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta meningkatkan peran fungsi Masjid sebagai pusat utama Dakwah dalam Nagari serta pendidikan Agama bagi masyarakat	Meningkatkan Kerjasama antar Lembaga (Keagamaan, Adat, Kemasyarakatan/ LSM, Ormas, Asosiasi dan Perguruan Tinggi) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Meningkatkan Kerjasama Penelitian dengan Lembaga Perguruan Tinggi; dan 2. Meningkatkan Kerjasama Pembangunan dengan Perusahaan/Asosiasi/Lembaga Swasta.	Pemerintahan Nagari dan Masyarakat yang ada di dalamnya	- Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan - Meningkatkan kerjasama yang optimal dalam pelayanan Nagari
4.	Menciptakan generasi muda yang berprestasi, baik di bidang seni dan olahraga	Meningkatnya partisipasi warga dan pemuda dalam pembangunan Nagari	1. Terlaksananya kegiatan pembinaan Kepemudaan dan Keolahragaan 2. Terlaksananya Pelatihan dan pendidikan Tanggap Darurat kebencanaan	Khususnya Masyarakat Nagari Limau Purut Tapan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
5.	Meningkatkan peran lembaga masyarakat dalam rangka pembangunan nagari	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Nagari	1. Meningkatkan Daya Dukung Masyarakat dalam Pembangunan Daerah 2. Meningkatkan Kemandirian	Pemerintahan Nagari dan lembaga yang ada di dalamnya beserta Masyarakat Nagari	- Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan - Melestarikan pembangunan serta dapat meluncurkan aktivitas masyarakat ke yang lebih baik

			dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Nagari dan Kelurahan		
6.	Mensejahterakan perekonomian masyarakat	Mengembangkan Pariwisata dan Pelestarian Budaya Lokal sesuai dengan Potensi yang dimiliki	1. Pelestarian Budaya Lokal 2. Meningkatkan Pembinaan Kelompok Seni Budaya Lokal; dan 3. Pengembangan Pariwisata Daerah	Masyarakat Nagari Limau Purut Tpana	• Peningkatan Kapasitas Ekonomi Masyarakat
		Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat	1. Meningkatkan Pembinaan Kelompok Tani, ternak, wanita tani dan Nelayan; 2. Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UMKM; 3. Pengembangan dan Pembinaan Sektor Industri, Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif.	Masyarakat Nagari Limau Purut Tapan	• Peningkatan Pembinaan Kelompok Tani
		Menciptakan Iklim Usaha yang Kompetitif	1. Penyediaan Payung Hukum untuk Mendukung Investasi 2. Penyediaan Lembaga dan Informasi Perdagangan 3. Penyediaan Tenaga Kerja Masyarakat yang		

			Berkualitas; dan 4. Meningkatkan a Perlindungan Ketenagakerjaan		
7.	Memberikan Bantuan BUMNAG	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Nagari	1. Meningkatkan a Pendapatan Asli Nagari (PAN) 2. Meningkatkan a Kontribusi Sektor terhadap PAN	Pemerintahan Nagari, Khususnya Masyarakat yang ada di Nagari Limau Purut Tapan	• Peningkatan Kapasitas pengurus BUMNAG
8.	Meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang berorientasi kepada peningkatan ekonomi masyarakat	Mengembangkan Sektor Ekonomi sesuai Potensi, Kesesuaian Lahan dan Karakteristik Masyarakat	1. Pengembangan Lahan dan Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan 2. Meningkatkan a Produksi Ternak dan pertanian	Masyarakat Nagari Limau Purut Tapan	• Peningkatan Kapasitas Peternak

BAB V PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian terhadap Kondisi Nagari, Potensi dan Masalah. Serta daftar RPJMNag 2018 s/d 2024, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat banyak masalah dan potensi untuk mencapai Visi dan Misi Nagari.
2. Dibutuhkan perhatian lebih dalam Peningkatan, Pengembangan dan Pemanfaatan Pembangunan Nagari.
3. Diperlukan komitmen yang baik dari berbagai pihak untuk mewujudkan Pembangunan Nagari.
4. Keberhasilan Pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin kelangsungan Pembangunan Nagari.
5. Keberhasilan Pembangunan di tingkat Nagari pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana Komitmen dan Konsisten Pemerintahan dan Masyarakat Nagari saling bekerja sama membangun Nagari.

b. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka beberapa Saran yang perlu disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) merupakan satu-satunya Dokumen Perencanaan yang diakui di Nagari, dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan selama periode 2018 s/d 2024 yang selanjutnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKPNag).
2. Dalam pelaksanaan dan implementasi RPJMNag ini, diharapkan adanya review, evaluasi dan pengawasan yang mendalam untuk menjaga konsistensi Pembangunan Nagari.